

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.

Ketua

Neni Isnaeni, S.Si., Apt., M.Si

Anggota

Adita Kurniawati, S.Farm.

Andi Herman Andi Tantu, SE

Atiek Supardiati Eka S., S.Si., Apt., M.KM

Atika Aprillia Purnama, S.M.

Dara Sevyra Ayuningtyas, S.Ak

Diah Lestari, S.Si., M.Si.

Dra. Hasti Kusuma Prabaning Budi, Apt.

Dwi Susilowati, S.M

Hasna Nur Syahidah, S.Farm., Apt

Haysyska, S.Farm

Lindsay Helki Kendek, S.Farm, Apt

Maisaroh, SE

Nurul Hafshah, S.Si

Raisa Vonna Fatimah, S.Kom

Sri Purwaningsih, S.F, Apt.,M.Si

Sri Utaminingsih, S.Si., Apt.

Widiyanto Kurniawan, S.Farm, Apt, M.Sc

Widya Sagita Br. Tampubolon, S.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dapat diselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang merupakan salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM), telah menyelenggarakan SAKIP, untuk itu PPOMN wajib menyusun Laporan Kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dan awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja PPOMN tahun 2025. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPOMN Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Eselon II Tahun 2025. Sasaran Strategis PPOMN 2025-2029 disusun berdasarkan *log frame* (kerangka logis) Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPOMN berkontribusi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 4 Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan.

Laporan Kinerja ini berisi penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis PPOMN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kendala/hambatan dalam mencapai target kinerja setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan PPOMN untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumen ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 dan 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis PPOMN tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja PPOMN akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai salah satu unit Satuan Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPPOMN atas kinerjanya selama tahun 2025. Disamping itu Laporan Kinerja ini sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPPOMN tahun 2025 dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki PPPOMN, maka PPPOMN telah menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029). Empat sasaran kegiatan tersebut adalah (1) Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, (3) Layanan Publik PPPOMN yang prima, dan (5) Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Sesuai dengan surat Sestama No. PR.07.2.08.25.451, proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan indikator dan target sehingga dari empat sasaran kegiatan tersebut yang awalnya diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan berubah menjadi 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan pada 2025 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** (realisasi $> 110\%$), yaitu Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** (realisasi $100\% < x \leq 110\%$), yaitu (1) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium, (2) **Indeks Pelayanan Publik PPPOMN**, (3) Nilai Pembangunan ZI PPPOMN dan 5 (lima) Indikator Kinerja dengan kriteria **Baik** (realisasi $90\% < x \leq 100\%$), yaitu (1) Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (2) Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (3) Nilai AKIP PPPOMN, (4) Nilai Kinerja Anggaran, dan (5) Indeks Manajemen Risiko PPPOMN.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2029 maka terdapat 1 (satu) indikator **perlu upaya keras** dan 8 (delapan) indikator **akan tercapai**.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya PPPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 105.800.044.000,- (seratus lima milyar delapan ratus juta empat puluh empat ribu rupiah). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dalam rangka efisiensi anggaran dan sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN Tahun 2025 serta surat nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, pada triwulan I PPPOMN melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp.65.841.813.000 (enam puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan anggaran PPPOMN menjadi Rp. 39.958.231.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Pada Triwulan III, PPPOMN melakukan revisi DIPA belanja pegawai dengan penurunan anggaran menjadi Rp.105.474.877.000,- (seratus lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah blokir anggaran yang dikelola PPPOMN menjadi Rp. 39.633.064.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Pada TW IV, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.10.02.21.08.25.234 tanggal 12 Agustus 2025, telah dilakukan pengakomodasian pembiayaan kegiatan REN Tahun 2025 melalui pemanfaatan hasil optimalisasi anggaran pada DIPA Satker PPPOMN sehingga anggaran PPPOMN menjadi Rp. 105.334.877.000 (seratus lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat anggaran hibah WHO sebesar Rp. 395.779.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran PPPOMN keseluruhan setelah blokir sebesar Rp. 39.888.843.000 (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Penyerapan anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 39.886.804.742 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan persentase 99,99% terhadap pagu blokir mandiri dan 37,72% terhadap pagu awal sebelum blokir mandiri.

Dalam mencapai target sasaran dan indikator kegiatan PPPOMN Triwulan IV tahun 2025, terdapat berbagai kendala/ permasalahan antara lain :

- Keterbatasan infrastruktur dan anggaran yaitu belum semua laboratorium memiliki alat dan fasilitas yang sesuai standar untuk jenis pengujian tertentu. Yang paling krusial adalah isu efisiensi anggaran di tahun 2025 yang berdampak terhadap terbatasnya anggaran operasional untuk pengujian, pengiriman sampel, dan pemeliharaan peralatan.

- Ketimpangan kapasitas antar laboratorium yaitu perbedaan signifikan antar laboratorium yang terlibat dalam suatu jejaring dalam hal kompetensi SDM, peralatan, dan ruang lingkup pengujian. Ketimpangan tersebut kerjasama dalam lingkup jejaring tidak berjalan efektif.
- Sistem informasi tidak terintegrasi yaitu laboratorium belum terkoneksi dalam satu sistem secara nasional atau regional.
- Pemblokiran/efisiensi anggaran di awal tahun 2025 yang mengakibatkan penyesuaian signifikan jumlah Metode Analisis dan Baku Pembanding, keterbatasan waktu pengadaan meskipun blokir dibuka kembali pada Oktober, serta kebutuhan pengembangan yang harus menyesuaikan kasus aktual sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, PPPOMN harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.
2. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan secara proporsional dan berbasis kinerja guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
3. Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung pengujian, seperti instrumen laboratorium, baku pembanding, reagen, bahan fungsional sebelum dilaksanakannya pengembangan metode analisis dan baku pembanding
4. Melakukan intervensi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM dengan pendampingan intensif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja PPPOMN tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang, antara lain:

- Menyusun perencanaan pengembangan Metode Analisis dan Baku Pembanding yang adaptif terhadap dinamika kasus dan perubahan kebijakan
- Melakukan pengadaan kebutuhan kritikal (reagen, baku pembanding, suku cadang) lebih awal untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan
- Mendorong integrasi sistem informasi laboratorium secara nasional/regional guna meningkatkan koordinasi, monitoring, dan konsistensi data kinerja.
- Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja berbasis digital, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk

dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.

- Melaksanakan analisis dan reviu indikator kinerja kegiatan secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi baseline pada perencanaan strategis PPPOMN periode 2025 sampai dengan 2029 dan indikator kinerja yang telah mencapai target.

HIGHLIGHT

1. Asesmen dan Koordinasi Fungsi Pengujian dengan Balai POM di Sofifi



Dalam rangka asesmen dan koordinasi fungsi pengujian terkait: penerapan regionalisasi laboratorium; pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL); penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017; penerapan konsep Green Laboratory; permasalahan pengujian dan pengelolaan sumber daya pengujian; dan penerapan K3 di laboratorium, PPPOMN perlu melakukan reassesmen dan visitasi

ke Balai POM di Sofifi. Reasesmen dilakukan untuk melihat implementasi dari tindak lanjut hasil rekomendasi asesmen tahun sebelumnya. Pelaksanaan asesmen dan visitasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Februari 2025. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberi masukan kepada Balai dalam meningkatkan fungsi pengujian antara lain penambahan jumlah sampel untuk verifikasi metode analisis, peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan verifikasi metode analisis, perawatan dan perbaikan instrumen secara berkala. Selain itu, BPOM di Sofifi perlu membuat strategi pengujian berbasis resiko dengan tetap memperhatikan mutu hasil pengujian dan efektifitas pengawasan, dan mempertahankan konsistensi implementasi ISO/IEC 17025:2017 secara efektif BPOM di Sofifi melalui penerapan budaya mutu yang kuat, komitmen individu yang tinggi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

2. Peresmian Regional Jayapura



Regionalisasi Laboratorium merupakan pengelompokan laboratorium berdasarkan kedekatan wilayah atau letak geografis, kemudahan transportasi, dan pengiriman sampel. Pertemuan Nasional Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2024 lalu menghasilkan rekomendasi perlunya penambahan satu Region (Region 8) di Indonesia Timur, yaitu Region Jayapura, dengan anggota Balai POM

Manokwari, Loka POM Merauke, Mimika dan Sorong. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan UPT BPOM 2025 dan Peresmian

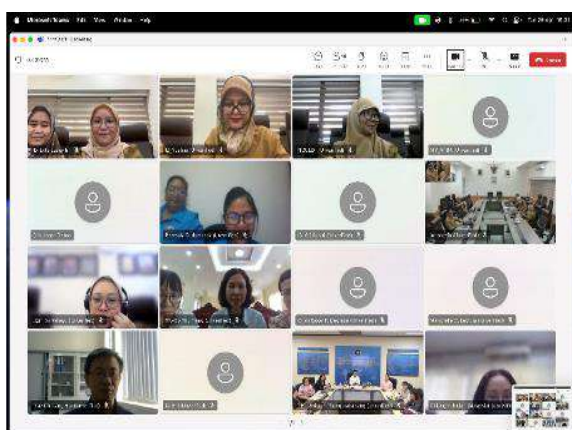
Laboratorium Regional Jayapura, dengan Tema “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui pengelompokan dan penambahan Regional Jayapura diharapkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul laboratorium BPOM semakin terfokus dan terarah sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta pemerataan layanan pengujian serta peningkatan respon terhadap kebutuhan pengujian lokal.

3. Partisipasi 24th ACTLC Meeting

Pertemuan ke - 24 Komite Laboratorium Pengujian Kosmetik ASEAN (ACTLC) dilaksanakan pada 28 - 29 April 2025 secara daring. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Sekretariat ASEAN. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian meeting ASEAN Cosmetic Committee



(ACC) ke-42 yang dihadiri oleh perwakilan dari sekretariat ASEAN serta negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dalam kesempatan ini, Indonesia memaparkan progress elevasi metode uji 1,4-Dioksan dalam produk kosmetik (ISO/PWI 24913) ke tingkat Internasional, yaitu standar ISO. Saat ini, proses tersebut sudah berada dalam tahap pengumpulan ballot 5 negara pendukung yang diperlukan dan sudah terdapat 3 negara yang memberikan dukungan kepada Indonesia serta Indonesia sedang berproses menggalang dukungan dari negara lainnya.



4. Pendampingan Pemenuhan SKL Tingkat 1 dan 2

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang digunakan sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium Badan POM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, baku pembandingan dan standar kompetensi. Dalam



rangka peningkatan pemenuhan SKL Tingkat 1 dan 2 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Penerbitan SK Kepala BPOM No. 161 tahun 2025 tentang SKL UPT di Lingkungan BPOM, bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring, pendampingan pemenuhan SKL Laboratorium Loka dan Balai POM, dan Monev pemenuhan SKL Tingkat 1 dan Tingkat 2. Pendampingan pemenuhan SKL

Laboratorium Loka dan Balai POM, salah satunya dengan visitasi ke 4 UPT, yaitu Balai POM di Kabupaten Bima, Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang telah terlaksana pada tanggal 6 - 9 Mei 2025. Tujuan dari visitasi ini yaitu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan SKL termasuk progress kelengkapan sarana prasarana laboratorium yang mendukung implementasi fungsi pengujian di laboratorium



Loka/Balai POM. Dari hasil pendampingan secara umum bahwa (1). Status bangunan untuk Balai POM di Kabupaten Bima sudah hak milik sendiri, sedangkan untuk Balai POM di Tulang Bawang berstatus pinjam pakai milik kantor Satpol PP, bangunan di Loka POM di Lubuklinggau dan Loka POM Belitung berstatus sewa; (2). Laboratorium yang telah tersedia di 4

(empat) UPT adalah laboratorium kimia sedangkan laboratorium mikrobiologi belum tersedia; (3). Laboratorium Loka dan Balai POM telah membuat perencanaan peningkatan pemenuhan SKL dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan (4). Pemahaman terhadap sistem mutu ISO 17025:2017 ditingkatkan melalui sosialisasi ISO 17025:2017 yang diselenggarakan secara daring oleh PPPOMN.

5. Green Lab Forum and Awards

Konsep *green laboratory* bukan hal baru di BPOM, prinsip ini sudah dituangkan dalam Grand Design Penguatan Laboratorium BPOM yang diluncurkan tahun lalu. Pada tanggal 26 Juni 2025, Kepala BPOM Bapak Taruna Ikrar secara langsung menyerahkan penghargaan bagi



laboratorium-laboratorium terbaik dalam ajang ***Green Laboratory Forum and Awards BPOM***.

Acara penghargaan ini digelar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, dan menjadi salah satu bukti nyata bahwa laboratorium BPOM siap menjawab tantangan global. Lomba Implementasi Green Laboratory BPOM 2025 telah diikuti oleh 38 laboratorium dari total 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia. Para peserta dinilai

oleh Tim Green Laboratory PPPOMN dengan empat aspek utama: efisiensi energi, efisiensi air, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta pengelolaan material. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengumpulan data pada April – Mei 2025 hingga tahap verifikasi lapangan melalui visitasi. Dari tahap penilaian ini, dipilih 10 laboratorium dengan skor tertinggi, lalu disaring lagi menjadi lima terbaik. Juara Umum diraih Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, disusul BBPOM di Palangka Raya sebagai Runner Up. Piagam diserahkan langsung oleh Taruna Ikrar kepada Sofiyani Chandrawati Anwar dan Ali Yudhi Hartanto, pimpinan dari masing-masing UPT pemenang. Selain penghargaan umum, BPOM juga memberikan apresiasi untuk kategori penilaian khusus. BBPOM Palangka Raya meraih penghargaan Efisiensi Energi, BBPOM Medan untuk Efisiensi Air, BBPOM Banjarbaru pada Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan, BBPOM Mataram di kategori Sumber dan Siklus Material, serta



Inovasi Terbaik diraih BBPOM Jakarta. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi laboratorium lainnya untuk bergerak ke arah yang sama. Masih ada 38 laboratorium UPT yang sekarang sedang dipetakan. Dalam dua tahun ke depan, diharapkan implementasi *green laboratory* bisa diterapkan secara menyeluruh.

6. Visitasi Pendampingan Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Makanan

Dalam rangka mengawal laboratorium eksternal pengujian obat dan bahan obat dalam pemenuhan rekognisi, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional melakukan pendampingan pemenuhan terhadap aspek-aspek yang menjadi persyaratan dalam Pedoman Rekognisi laboratorium Eksternal pengujian Obat dan bahan obat. PPPOMN telah melakukan verifikasi *self assesment* sesuai tools pemenuhan kemampuan laboratorium untuk 8 Laboratorium Eksternal. Berdasarkan evaluasi hasil verifikasi *self assesment* telah



terseleksi 4 laboratorium eksternal yang akan dilakukan pendampingan. Visitasi dan pendampingan telah dilaksanakan pada tanggal 2 - 10 Juli ke 4 laboratorium eksternal, yaitu Laboratorium PT. Pharma Metric Labs pada 2 Juli 2025, Laboratorium LPPOM MUI 3 Juli 2025, Laboratorium PT. Tuv Nord Indonesia 8 Juli 2025, dan Laboratorium PT. Equilab International 10 Juli 2025. Pendampingan

tersebut melibatkan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, serta Tim Pendampingan Laboratorium Eksternal PPPOMN. Dari hasil visitasi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh lab eksternal tersebut. Diharapkan penyusunan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dan rekomendasi perbaikan dapat selesai ditindaklanjuti pada akhir September sehingga pada TW IV 2025 dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan ini.



7. Pendampingan Penerapan Green Laboratory UPT BPOM



Laboratorium hijau (*green laboratory*) merupakan laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, operasional, serta pengelolaan sumber daya. Manfaat implementasi green laboratory ini antara lain pengurangan biaya operasional jangka panjang, peningkatan kesehatan dan keselamatan

kerja, kontribusi pada tujuan keberlanjutan global, serta meningkatkan citra institusi.

Berdasarkan pemetaan dan penilaian penerapan *green laboratory* UPT BPOM pada 2025, masih terdapat beberapa UPT yang belum masuk kategori *Bronze Green Laboratory*. Oleh karena itu, pada bulan Juli 2025 dilakukan desk dan pendampingan penerapan *green laboratory* baik secara daring melalui *zoom meeting* maupun luring. Desk dan pendampingan telah dilakukan untuk BBPOM Pontianak tanggal 10-11 Juli 2025, BBPOM Bandung 21 Juli 2025, BBPOM Padang 24 Juli 2025, BPOM Manokwari 30 Juli 2025, dan BPOM Tarakan pada 31 Juli 2025. Berdasarkan hasil desk disimpulkan bahwa secara garis besar UPT tersebut perlu perbaikan dan peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip *green laboratory* dengan baik sesuai dengan tools asesmen *Green Laboratory*. Perilaku *green laboratory* yang telah diterapkan juga diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga dalam dua tahun ke depan, implementasi *green laboratory* bisa diterapkan secara menyeluruh.

8. The 17th Meeting on the Production of ASEAN Reference Substance



Baku pembanding merupakan salah satu komponen penting dalam penjaminan mutu hasil pengujian di laboratorium. Sejak tahun 1980 PPOMN telah berkolaborasi dengan 10 negara ASEAN untuk mengembangkan ARS (*ASEAN Reference Standard*) yang digunakan untuk kebutuhan negara-negara anggota. **The 17th Meeting on the Production of ARS** telah dilaksanakan di Nonthaburi pada 16-18 Juli 2025 oleh *Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health* (Thailand). Pertemuan ini diikuti oleh 12 delegasi dari 10 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, dan Vietnam.

Delegasi dari Cambodia, Lao PDR, Myanmar, dan Philippines mengikuti secara daring. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Assoc. Prof. Dr. Kunchit Judprasong (Quality manager of service laboratory, Institute of Nutrition, Mahidol University, Thailand) dan Ms. Siriwan Chaisomboonpan, Director of the Bureau of Drug and Narcotic. **The 17th Meeting on the Production of ARS** bertujuan mendiskusikan progres, status dan kelanjutan proyek serta permasalahan terkini dari masing-masing anggota; memperkuat kapabilitas dan mendiskusikan peningkatan produksi ARS sesuai dengan ISO 17034:2016, mengusulkan dan mendiskusikan rencana aksi *ASEAN Reference Substances Working Group* (ARSWG). Pada pertemuan ini juga disampaikan pentingnya untuk melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan dan produksi ARS. Diharapkan peserta dapat mengadopsi pembuatan baku

pembandingan sesuai ISO 17034:2016 sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat inisiatif ARS, meningkatkan kredibilitas dan pengakuan baku pembandingan secara internasional.

9. Capacity Building PPPOMN



Di tengah dinamika kerja yang terus berkembang, peningkatan semangat dan motivasi kerja pegawai menjadi hal yang krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kegiatan pembinaan berperan sebagai sarana penguatan nilai-nilai kebersamaan, profesionalisme, serta kolaborasi antar pegawai. Melalui pendekatan yang menyentuh aspek

pengembangan diri dan komunikasi interpersonal, pembinaan diharapkan mampu membentuk karakter pegawai yang berintegritas, bertanggung jawab, dan adaptif. Sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, PPPOMN menyelenggarakan kegiatan Capacity Building pada tanggal 28 Juli 2025 dengan tema “Menghargai Jejak Pengabdian, Transformasi Leadership untuk Generasi Berikutnya”. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan TRA Indonesia sebagai mitra penyelenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan memperkuat kesiapan pegawai dalam menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Rangkaian kegiatan dirancang dalam bentuk outbound training, diskusi kelompok, permainan tim (*team building games*), serta sesi refleksi. Seluruh aktivitas difasilitasi oleh tim dari TRA Indonesia, yang berpengalaman dalam pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi.



Narasumber pada kegiatan ini Prof. Rhenald Kasali., Ph.D, Founder Rumah Perubahan; Prof. dr. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D, dan William Adi Teja, B.M.S, MD, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Melalui simulasi, studi kasus ringan, dan kegiatan reflektif, peserta diajak untuk mengenali kontribusi masa lalu, membangun kesadaran peran masing-masing dalam organisasi, serta mempersiapkan diri menjadi agen perubahan di masa mendatang.

10. Pendampingan Akreditasi Laboratorium ISO/IEC 17025:2017

Dalam rangka mendukung proses akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Akreditasi di Balai POM di Kabupaten Bogor pada 16 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis, pembinaan, dan evaluasi kesiapan laboratorium dalam memenuhi persyaratan akreditasi sesuai standar yang



berlaku. Kegiatan koordinasi dalam rangka pendampingan akreditasi ISO 17025:2017 untuk memastikan kesiapan dokumen, personel, dan sistem manajemen mutu laboratorium Balai POM di Bogor. Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan, terutama dalam aspek

dokumentasi, prosedur operasional, serta penguatan sistem manajemen mutu laboratorium. Melalui pendampingan ini, BPOM di Bogor diharapkan dapat segera menyusun dan melengkapi seluruh prosedur wajib sesuai klausul ISO/IEC 17025:2017; melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil review dan audit internal; menyusun POA terperinci dengan target waktu dan penanggung jawab yang jelas; dan meningkatkan koordinasi antar tim teknis dan manajemen mutu dalam persiapan asesmen KAN.

11. Pencatatan Rekor Muri Baku Pembanding, Launching SNI Kosmetik, Launching Website Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia, dan Penandatanganan PKS



Tanggal 14 November 2025 lalu, PPPOMN melaksanakan kegiatan Pencatatan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Launching SNI Kosmetik, Launching Website Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Pada kegiatan ini, Kepala Badan POM memberikan *Keynote Speech* dengan tema “**Dari Laboratorium BPOM untuk**

Bangsa: Tingkatkan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan beresiko melalui inovasi produksi baku pembanding dan metode analisis terstandar” yang menegaskan pentingnya inovasi produksi baku pembanding serta penerapan metode analisis terstandar sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat. Pada sesi ini turut diputar video yang menggambarkan proses, capaian, dan kontribusi BPOM dalam pengembangan baku pembanding. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Rekor MURI kepada Kepala Badan POM yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan nasional atas pencapaian Badan

POM atas kontribusi nyata melakukan “Produksi senyawa baku pembanding dengan ketersediaan terbanyak di Indonesia”. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses verifikasi oleh tim MURI yang menilai konsistensi, kualitas, serta kontribusi nyata BPOM dalam menyediakan baku pembanding untuk mendukung pengujian laboratorium secara andal dan terstandar. Prosesi penyerahan ini sekaligus menegaskan posisi Badan POM sebagai lembaga yang berperan strategis dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui inovasi, kemandirian produksi, dan peningkatan mutu layanan laboratorium di tingkat nasional. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan peluncuran resmi SNI



Kosmetik sebagai wujud komitmen dalam peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk kosmetik nasional. Setelah itu, dilakukan launching Website Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia yang diawali dengan pemaparan tujuan pengembangannya, peran strategis dalam penguatan koordinasi antar laboratorium, serta demonstrasi singkat mengenai fitur layanan yang tersedia pada platform tersebut. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak-pihak terkait sebagai bentuk penguatan sinergi dan harmonisasi metode pengujian kosmetik di tingkat nasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang selaras dengan tujuan penguatan sistem laboratorium dan standardisasi nasional.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vii
DAFTAR ISI	13
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR GAMBAR	15
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 ISU STRATEGIS	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	6
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	11
2.3 PERJANJIAN KINERJA	12
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	13
2.5 METODE PENGUKURAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	91
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	97
3.4 REALISASI ANGGARAN	100
BAB IV PENUTUP	105
4.1. KESIMPULAN	105
4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kerja Tahunan PPPOMN Tahun 2025	11
Tabel 2 Perjanjian Kerja PPPOMN Tahun 2025	13
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) PPPOMN Tahun 2025	14
Tabel 4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis.....	15
Tabel 5 Predikat Kinerja Organisasi	16
Tabel 6 Kategori capaian kinerja hasil perbandingan	16
Tabel 7 Metode Pengukuran Kinerja PPPOMN.....	17
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 9 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik	22
Tabel 10 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" Tahun 2025.....	25
Tabel 11 Perbedaan Defenisi Operasional Indikator Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada 2 Periode Renstra	26
Tabel 12 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" terhadap target 2025	26
Tabel 13 Kegiatan Jejaring Tahun 2025.....	29
Tabel 14 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Suatu Jejaring Secara Terpadu" Tahun 2025.....	31
Tabel 15 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam sesuatu jejaring terpadu	31
Tabel 16 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau".....	33
Tabel 17 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau.....	34
Tabel 18 Capaian Kinerja "Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium" Tahun 2025	37
Tabel 19 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium	38
Tabel 20 Capaian Kinerja "Nilai Efektifitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium" Tahun 2025.....	41
Tabel 21 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium.....	42
Tabel 22 Capaian Kinerja "Jumlah Laboratorium Eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar"	44
Tabel 23 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Laboratorium Esternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	44
Tabel 24 Capaian Kinerja "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangsang Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025	46
Tabel 25 Capaian Kinerja "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2029	48
Tabel 26 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	50
Tabel 27 Capaian Kinerja Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025	53
Tabel 28 Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	57
Tabel 29 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" Tahun 2025	60
Tabel 30 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" terhadap target Tahun 2025	62

Tabel 31 Matriks Rekomendasi Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	63
Tabel 32 Capaian Kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" Tahun 2025	65
Tabel 33 Matriks Rekomendasi TW IV Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	68
Tabel 34 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" terhadap Target Tahun 2025	71
Tabel 35 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" terhadap target akhir tahun Renstra (2029)	72
Tabel 36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN dengan unit kerja lainnya	73
Tabel 37 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	74
Tabel 38 Capaian Kinerja Nilai AKIP PPPOMN terhadap target Tahun 2025	77
Tabel 39 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" terhadap target tahun 2025	77
Tabel 40 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai AKIP PPPOMN	81
Tabel 41 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran	82
Tabel 42 Capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN TW IV Tahun 2025	82
Tabel 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian NKA Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel 44 Capaian Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN terhadap target tahun 2025" ...	83
Tabel 45 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan unit kerja lainnya	83
Tabel 46 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	85
Tabel 47 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" tahun 2025	87
Tabel 48 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" terhadap target tahun 2029	88
Tabel 49 Matriks Rekomendasi TW IV Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	91
Tabel 50 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	91
Tabel 51 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja	98
Tabel 52 Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan	101
Tabel 53 Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja PPPOMN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Asta Cita Presiden	7
Gambar 2 Capaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	47
Gambar 3 Capaian Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	55
Gambar 4 Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	60
Gambar 5 Tren Capaian Indikator Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2023 - 2025	61
Gambar 6 Tren Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	65
Gambar 7 Nilai Implementasi ZI PPPOMN	72
Gambar 8 Perbandingan Nilai AKIP PPPOMN dengan unit pusat lain	78
Gambar 9 Realisasi Indeks Manajemen Risiko Pusat-Pusat	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen penting yang mencerminkan kinerja dan akuntabilitas sebuah instansi pemerintah. Penyusunan dokumen ini diperlukan untuk beberapa alasan utama yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. LAKIP memastikan bahwa instansi pemerintah bekerja dengan transparan dan akuntabel. Dokumen ini menyediakan informasi yang jelas dan detail mengenai pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya. LAKIP berfungsi sebagai alat evaluasi bagi instansi pemerintah. Dokumen ini membantu dalam menilai sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) telah tercapai. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan serta menemukan area yang memerlukan perbaikan, dengan menyusun LAKIP, instansi pemerintah dapat menganalisis data kinerja yang ada untuk merencanakan kegiatan dan program di masa mendatang. Hal ini memastikan bahwa setiap rencana kerja didasarkan pada data yang akurat dan relevan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan. Dengan adanya laporan ini, dapat diketahui bagaimana anggaran digunakan dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, penyusunan LAKIP menjadi sangat penting bagi setiap instansi pemerintah. Proses ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. PPPOMN sebagai salah satu unit kerja di BPOM sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka PPPOMN memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dan setiap triwulan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025

PPOMN merujuk kepada Rencana Strategis PPPOMN tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala PPPOMN tahun 2025.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 2001 dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan sesuai SK Kepala BPOM No.02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Pusat Pengujian Obat dan Makanan berubah nama menjadi “Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN)”. Sesuai dengan Bab IX bagian pertama SK Kepala BPOM No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001, PPOMN adalah unsur pelaksana tugas Badan POM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017, PPOMN berubah menjadi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian Obat dan Makanan.

Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPPOMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
- d. pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku Pembanding;
- g. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan bahwa terdapat 3 UPT di PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi dan Balai Kalibrasi. Pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 Ketiga UPT tersebut masih dalam satu anggaran dengan PPPOMN, tetapi mulai tahun 2025 ketiga UPT tersebut mempunyai anggaran tersendiri sehingga mempunyai rencana strategis tersendiri.

1.3 ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis PPPOMN perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran strategis, baik isu internal maupun eksternal

- ISU INTERNAL PPPOMN ANTARA LAIN:

1. Terlaksananya kemandirian satuan kerja mandiri/UPT PPPOMN termasuk anggaran dan sasaran strategis tiga UPT PPPOMN

2. PPPOMN belum memiliki *Business Continuity Plan* untuk memastikan keberlangsungan proses pengujian dengan adanya bencana, krisis ataupun musibah di laboratorium
3. Belum adanya integrasi dan pengawasan integritas sistem data di laboratorium terkait pelayanan yang diberikan
4. Pengelolaan sumberdaya laboratorium untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan
5. Kebutuhan laboratorium untuk kegiatan administrasi dan pengarsipan
6. Belum optimalnya pengelolaan SDM terutama penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan dan ketimpangan beban kerja
7. Belum memiliki ruangan untuk pembuatan sampel negatif porcine untuk Provider UP Molekuler. Selama ini pembuatan sampel negatif memakai ruang kuliah saat ruang kuliah sedang tidak digunakan
8. Penambahan peralatan laboratorium baku pembanding kimia
9. Pengelolaan pola karir SDM PPPOMN masih kurang optimal
10. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan jaringan listrik dan pemeliharaan gedung dan bangunan kecil
11. Biaya pemeliharaan dan perbaikan alat masih terbatas, terutama alat LC-MSMS, GC-MSMS dan ICPMS yang memerlukan biaya cukup mahal
12. Reagen yang akan dan telah expire date yang belum terpakai
13. Belum memadainya sarana prasarana laboratorium (kebutuhan alat lab, pemeliharaan, refreshment alat lab yang sudah tidak layak, dll
14. Sarana prasarana laboratorium hewan percobaan yang membutuhkan refreshmen.
15. Pengelolaan sumberdaya laboratorium untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan
16. Perlunya revitalisasi laboratorium guna menunjang pengujian
17. Belum tersedianya sentra tanggap darurat atau early warning sistem dan belum optimalnya SPIMKer dalam pengawasan Obat dan Makanan
18. Implementasi LIMS di Laboratorium Obat dilaksanakan tahun 2024. Implementasi LIMS ini membutuhkan perubahan contohnya pengujian paper based menjadi digital, perubahan prosedur terkait alur kerja, dan pelatihan personel penguji. Selain itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan personel untuk input seluruh data laboratorium yang dibutuhkan untuk pengujian ke sistem LIMS (inventory dan pembuatan seluruh prosedur pengujian dan perhitungan)

19. Belum memanfaatkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara memadai dalam melakukan reviu atas pengelolaan manajemen risiko
20. Belum terdapat pengelolaan manajemen K3
21. Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi WBS
22. Belum semua Petugas dan pegawai yang masuk dalam risiko tinggi penerima suap terpapar ISO 37001:2016

- ISU EKSTERNAL PPPOMN ANTARA LAIN:

1. Keikutsertaan dalam jejaring Nasional dan International.
2. Pengawasan Obat dan Makanan adalah tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar K/L, Akademisi, maupun Pelaku Usaha termasuk dalam pengujian laboratorium.
3. Tuntutan pengembangan metode analisis terkait pengujian keamanan dan mutu obat bahan alam semakin besar, terutama terkait identifikasi tanaman dilarang dan tanaman mengandung bahan berbahaya.
4. PPPOMN sebagai inisiator terbentuknya jejaring Bahan Acuan Nasional.
5. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik
6. Ketersediaan baku pembanding dan tuntutan pengembangan metode analisis belum memadai sesuai permintaan stakeholder
7. Adanya persaingan yang tidak sehat akibat belum jelasnya regulasi yang mengatur kegiatan transaksi ecommerce yang diimplementasikan di laboratorium
8. Beberapa indikator kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai status WBBM
9. Adanya interaksi antara pegawai dan pihak ke-3 baik dalam proses tender, pengadaan barang dan jasa, hal perizinan, kerangka bisnis, pelaksana kebijakan, konsultasi, pemeriksaan dan pelaporan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Visi, misi, tujuan BPOM dan PPPOMN, serta sasaran kegiatan PPPOMN sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPOM dan PPPOMN tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Visi BPOM

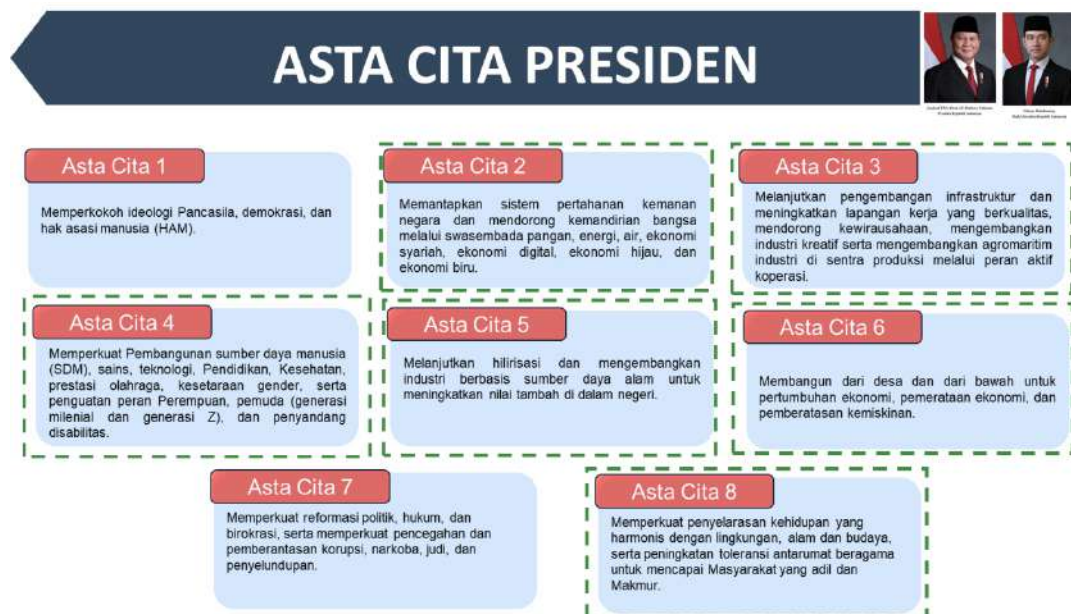
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025 - 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1 Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung **Asta Cita 4** yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Namun demikian, BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan BPOM

Menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada dan sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, maka tujuan BPOM untuk periode 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi

konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi. Tujuan BPOM sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dalam rangka implementasi misi BPOM dan PPPOMN sebagai bagian dari fungsi Pengawasan Obat dan Makanan *post market*, maka PPPOMN berperan menunjang misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan PPPOMN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, tujuan PPPOMN dalam kurun waktu periode Renstra 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa produk farmasi dan pangan olahan yang tersedia di masyarakat memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Kondisi keamanan ini dimaksudkan bahwa produk farmasi dan pangan olahan tidak mengandung bahan berbahaya atau cemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan pengujian bahan baku dan produk akhir untuk memastikan tidak ada kandungan zat berbahaya baik dari kimia maupun mikroba. Sedangkan untuk kualitas (mutu) maka produk yang diedarkan memiliki standar mutu sesuai yang ditetapkan, yang dipastkan salah satunya melalui pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas produk. Diharapkan dengan terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu ini akan memberikan rasa aman, mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan meminimalkan risiko kesehatan akibat penggunaan atau konsumsi produk yang tidak aman.

2. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima

Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima sebagai upaya menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, bekerja secara optimal, serta memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat. Organisasi seperti ini akan lebih mudah mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas. Organisasi yang profesional artinya memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan memiliki integritas tinggi. Profesionalisme mencakup sikap, perilaku, dan kompetensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Organisasi yang adaptif adalah mampu menanggapi perubahan dengan cepat dan tepat, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi penting untuk bertahan dalam menghadapi tantangan baru dan dinamika yang berkembang.

Organisasi yang efektif adalah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal sedangkan organisasi yang efisien adalah organisasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya (waktu, tenaga, dan anggaran) secara hemat dan maksimal untuk mencapai tujuan.

Sasaran Kegiatan PPPOMN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025-2029. Mengacu pada sasaran strategis BPOM, PPPOMN telah merumuskan 4 Sasaran Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis BPOM. Sasaran Kegiatan PPPOMN yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi PPPOMN, yaitu:

1. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
3. Layanan Publik PPPOMN yang prima
4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sesuai dengan surat Sestama No. PR.07.2.08.25.451, proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 sehingga adanya perubahan indikator dan target. Dari Triwulan I sampai dengan II, 4 (empat) sasaran kegiatan PPPOMN diukur melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan namun setelah terdapat pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 di TW III, 4 (empat) sasaran kegiatan PPPOMN diukur keberhasilannya melalui 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan. Sembilan indikator kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan
2. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
3. Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
4. Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN
6. Nilai Pembangunan ZI PPPOMN
7. Nilai AKIP PPPOMN

8. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN
9. Indeks Manajemen Risiko PPPOMN

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja tahunan PPPOMN tahun 2025 berdasarkan Kerangka Logis sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Kerja Tahunan PPPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Sesuatu Jejaring Secara Terpadu	42
		Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau	40
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Telah Didukung Oleh Laboratorium Digital	40
		Persentase Peningkatan Ruang Lingkup Laboratorium Eksternal yang Diberdayakan	10
		Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium	77
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 5	80,78
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 4	72,3
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 3	69,5
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 2	14
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 1	12,7
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80,78
		Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,38
3	Layanan Publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang Prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7
4	Terwujudnya Tatakelola Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	92,10
		Nilai AKIP PPPOMN	86,45
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,30

	Makanan Nasional (PPOMN) yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	3,4
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Kontrak Kinerja antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dijabarkan ke dalam 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Seiring dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029 yang mengakibatkan perubahan prioritas dan asumsi strategis, serta berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, pada Triwulan III Tahun 2025 PPOMN telah melakukan **revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)**. Revisi tersebut memuat perubahan jumlah indikator kinerja, dari semula 13 (tiga belas) indikator menjadi 9 (sembilan) indikator.

Perubahan signifikan terjadi pada Sasaran Kegiatan 1 (SK 1), yaitu “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”. Sebelumnya, SK 1 terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu;
2. Persentase pemenuhan laboratorium hijau;
3. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium;
4. Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar; dan
5. Nilai efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium.

Namun, setelah proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, kelima indikator tersebut digabung dan disederhanakan menjadi 1 (satu) indikator, yaitu “Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

Penyederhanaan indikator ini dilakukan untuk meningkatkan fokus, efektivitas pengukuran kinerja, serta memastikan keselarasan antara Perjanjian Kinerja dengan arah kebijakan dan prioritas strategis BPOM periode 2025–2029

Tabel 2 Perjanjian Kerja PPPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	42,3
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,5
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59
		Nilai AKIP PPPOMN	85
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15

Perbedaan target antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) terjadi karena perbedaan tahapan dalam proses perencanaan kinerja. RKT disusun pada tahap awal sebagai dokumen perencanaan yang memuat target sesuai dengan sasaran dan target awal yang ditetapkan, sehingga masih bersifat rencana. Adapun PK disusun setelah melalui proses pembahasan (desk) dengan unit pengampu dan mempertimbangkan kesanggupan PPPOMN serta ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan (sebelum efisiensi). Oleh karena itu, target dalam PK merupakan komitmen kinerja yang lebih realistis dan terukur.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja Kepala PPPOMN tahun 2025 selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) PPPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET				ANGGARAN
				B03	B06	B09	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	42,3	0	0	10,5	42,3	3.112.917.000
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,5	61,5	62,8	67,1	68,5	75.896.050.000
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	76,82	77,99	78,70	80,91	4.142.760.000
		Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	75,51	76,48	77,22	80,04	2.183.797.000
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7	-	-	-	4,7	596.430.000
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59	-	-	-	91,59	452.407.000
		Nilai AKIP PPPOMN	85	-	-	-	85	1.165.000
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	-	-	-	5	19.344.590.000
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	-	-	-	3,15	540.000

Capaian RAPK Kepala PPPOMN dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS pada menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Capaian RAPK Kepala PPPOMN ini menjadi masukan untuk melakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja PPPOMN mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai Keputusan BPOM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM. Pengumpulan data kinerja PPPOMN dilakukan melalui aplikasi Sirendra (<https://sites.google.com/view/sirendra2>).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan rumus sebagai berikut:

Pengukuran indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam mengukur kriteria pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan kategori sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Setelah dilakukan untuk perhitungan capaian pada masing-masing Indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. **NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan**

jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

Tabel 5 Predikat Kinerja Organisasi

Kriteria	NKO	Notifikasi Warna
ISTIMEWA	$>100\%$	
BAIK	$80\% < x \leq 100\%$	
BUTUH PERBAIKAN	$60\% < x \leq 80\%$	
KURANG	$20\% < x \leq 60\%$	
SANGAT KURANG	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk menentukan nilai capaian tahun berjalan bila dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) disampaikan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 6 Kategori capaian kinerja hasil perbandingan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/melampaui	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun, dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $> 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun, dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - 100\%$ ($70 > x < 100$)	
Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun, dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $< 70\%$ ($x < 70\%$)	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan digitalisasi menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

Tabel 7 Metode Pengukuran Kinerja PPPOMN

No.	Indikator Kinerja	Penanggungjawab Pengumpul Data	Metode Pengukuran
1.	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	- Neni Isnaeni - Adita Kurniawati - Widiyanto Kurniawan - Raisa Vonna Fatimah - Diah Lestari - Widya Sagita - Nurul Hafshah	Implementasi Grand Design laboratorium diukur melalui 5 komponen berdasarkan pembobotan : a. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu b. Persentase implementasi laboratorium hijau c. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium d. Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium

No.	Indikator Kinerja	Penanggungjawab Pengumpul Data	Metode Pengukuran
			e. Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan : (35% x a) + (20% x b) + (20% x c) + (15% x d) + (10% x e)
2.	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	Haysyska	Nilai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari penjumlahan dari seluruh Tingkat : - Tingkat 5 = (35% x Nilai SKL Tingkat 5) - Tingkat 4 = (22,5% x Rata-rata Balai Regional) + (2,5% x Rata-Rata UPT PPPOMN) - Tingkat 3 = (20 % x Rata-rata SKL Tingkat 3) - Tingkat 2 = (10 % x Rata-rata SKL Tingkat 2) - Tingkat 1 = (5% x Rata-rata SKL Tingkat 1)
3.	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Sri Utaminingsih	Realisasi dihitung dari banyaknya metode analisis yang dikembangkan mulai periode Renstra hingga periode pengukuran dibagi target akhir 2029 dikali 100%
4.	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Lindsay	Realisasi dihitung dari banyaknya baku pembanding yang dikembangkan mulai periode Renstra hingga periode pengukuran dibagi target akhir 2029 dikali 100%
5.	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Hasna Nur Syahidah	Realisasi diperoleh dari hasil survei terhadap enam aspek layanan publik PPPOMN: 1. Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Profesionalitas SDM (18%) 3. Sarana Prasarana (15%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%) 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%) 6. Inovasi (7%)
6.	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	Sri Purwaningsih	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi RB di PPPOMN dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

No.	Indikator Kinerja	Penanggungjawab Pengumpul Data	Metode Pengukuran
7.	Nilai AKIP PPPOMN	Dwi Susilowati	Realisasi diperoleh berdasar hasil evaluasi SAKIP terhadap lima komponen: 1. Perencanaan kinerja (24) 2. Pengukuran kinerja (24) 3. Pelaporan kinerja (12) 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (20) 5. Capaian kinerja (20)
8.	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Maisaroh	Realisasi dihitung dari penjumlahan (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Indikator pembentuk nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah: a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Indikator pembentuk nilai IKPA adalah: a. Revisi DIPA (bobot 10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) d. Belanja Kontraktual (bobot 10%) e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) g. Capaian Output (bobot 25%) h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
9.	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	Atiek Supardiati E.S.	Menggunakan kertas kerja pengukuran maturitas manajemen risiko

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan beberapa aspek diantaranya Kemampuan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal, Kemampuan menghasilkan output yang berkualitas, Kemampuan menyelesaikan tugas dan proyek tepat waktu.

Analisis akuntabilitas kinerja adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap sejauh mana sebuah organisasi atau individu telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi terhadap kinerja untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan harapan yang ditetapkan. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW IV	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN THDP TW IV 2025	CAPAIAN THDP TARGET 2025	KRITERIA THDP CAPAIAN TAHUNAN
Sasaran Kegiatan 1. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan								
1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan	42,3	42,3	%	50,41	119,17	119,17	 Tidak dapat disimpulkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW IV	SATUAN	REALISASI	CAPAIAAN THDP TW IV 2025	CAPAIAAN THDP TARGET 2025	KRITERIA THDP CAPAIAN TAHUNAN
	farmasi dan pangan olahan							
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium								
2	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	68,5	68,5	%	69,83	101,95	101,95	 Sangat Baik
3	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	80,91	%	80,77	99,83	99,83	 Baik
4	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	80,04	%	79,18	98,92	98,92	 Baik
Sasaran Kegiatan 3. Layanan Publik PPPOMN yang prima								
5	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7	4,7	Indeks	4,89	104,04	104,04	 Sangat Baik
Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal								
6	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59	91,59	Nilai	91,66	100,08	100,08	 Sangat Baik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW IV	SATUAN	REALISASI	CAPAIAH THDP TW IV 2025	CAPAIAH THDP TARGET 2025	KRITERIA THDP CAPAIAN TAHUNAN
7	Nilai AKIP PPOMN	85	85	Nilai	80,47	94,67	94,67	 Baik
8	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	5	5	Nilai	5	100	100	 Baik
9	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	3,15	3,15	Indeks	2,938	93,27	93,27	 Baik

Dari hasil pengukuran diatas dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**, 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria **Sangat Baik**, dan 5 (lima) Indikator Kinerja dengan kriteria **Baik**.

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik sebesar 100,31 dengan predikat **"Istimewa"** dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 9 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW IV	REALISASI	CAPAIAH	NORMALISASI CAPAIAN KINERJA
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	42,3	50,41	119,17	110

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW IV	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	68,5	69,83	101,95	101,95
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	80,77	99,83	99,83
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	79,18	98,92	98,92
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7	4,89	104,04	104,04
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59	91,66	100,08	100,08
		Nilai AKIP PPPOMN	85	80,47	94,67	94,67
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	5	100	100
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	2,938	93,27	93,27
Total Capaian PK						902,76
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						100,31
Predikat NKO						Istimewa

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing Sasaran Kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

IK 1. PERSENTASE PEMENUHAN GRAND DESIGN PENGUATAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

Grand Design (GD) Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di masa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Grand Design (GD) disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator pengembangan/pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Implementasi Grand Design laboratorium diukur melalui 5 komponen :

- Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu
- Persentase implementasi laboratorium hijau
- Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
- Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium
- Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan} = (35\% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (15\% \times d) + (10\% \times e)$$

Keterangan:

- Realisasi persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu
- Realisasi persentase pemenuhan laboratorium hijau
- Realisasi persentase implementasi digitalisasi laboratorium
- Realisasi Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium
- Realisasi persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” tahun 2025 sebagai berikut:

Target tahunan $(35\% \times 42) + (20\% \times 40) + (20\% \times 30) + (15\% \times 77) + (10\% \times 20) = 42,3$ Realisasi tahun 2025 $(35\% \times 42,4) + (20\% \times 60) + (20\% \times 49,2) + (15\% \times 78,2) + (10\% \times 20) = 50,41$
--

% Capaian Tahun 2025 $(\text{Realisasi/Target tahunan}) \times 100\% = (50,41/42,3) \times 100\% = 119,31\%$
--

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	42,3	50,41	119,31	 Tidak dapat disimpulkan

Capaian kinerja indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” pada tahun 2025 yaitu **Tidak dapat disimpulkan** karena capaian melebihi 110%. Hal ini disebabkan capaian masing-masing komponennya sesuai dan melebihi target yang ditetapkan. Realisasi capaian masing-masing komponen akan dijelaskan pada poin 1 - 5.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terjadi perbedaan definisi operasional, cara perhitungan serta

komposisi pembobotan masing-masing komponen pada periode Renstra 2025-2029. Perbedaan komponen dan pembobotan disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 11 Perbedaan Definisi Operasional Indikator Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada 2 Periode Renstra

Komponen indikator GD periode sebelumnya	Komponen indikator GD periode Renstra 2025-2029
Pedoman laboratorium hijau (2%)	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu (25%)
Pedoman digitalisasi laboratorium (2%)	Persentase implementasi laboratorium hijau Badan POM (20%)
Pedoman <i>integrated laboratory</i> (2%)	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium Badan POM (20%)
Penerapan regionalisasi laboratorium (2%)	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium (15%)
Pedoman pengembangan laboratorium di Loka POM (2%)	Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian obat dan makanan sesuai standar (10%)

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 12 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" terhadap target 2025

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	82,4	50,4	61,18	 Perlu Upaya Keras

Capaian realisasi indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” tahun 2025 terhadap target Renstra sebesar 61,18% dengan kriteria perlu upaya keras. Capaian tersebut masih rendah dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra sedangkan perhitungan target 2029 merupakan target kinerja kumulatif dengan kenaikan target

sekitar 10%/tahun sehingga diharapkan pada akhir tahun Renstra, target indikator kinerja ini dapat tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” hanya ada di PPPOMN, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pasal 133 yang menyatakan bahwa Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Analisis akuntabilitas masing-masing komponen untuk indikator “Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan” sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara Terpadu

Laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu adalah kolaborasi dan integrasi antara laboratorium POM di semua tingkatan untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif dan efisien. Implementasi Lab POM yang terintegrasi secara terstruktur dalam wadah jejaring, sehingga laboratorium POM akan mampu menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat. Laboratorium terintegrasi terdiri atas jejaring nasional dan internasional.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu dihitung sebagai berikut : $(72\% \times A) + (28\% \times B)$

A. Jejaring Nasional : $((a+b+c+d+e \text{ tahun } N) / (a+b+c+d+e \text{ 2025-2029}) \times 100\%$

Jejaring laboratorium POM yang dibentuk dengan melibatkan beberapa laboratorium Badan POM, lembaga pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta, terdiri atas 5 Jejaring :

1. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI): jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
2. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) : jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))

3. Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) : Jumlah kegiatan implementasi MA (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
4. Jejaring Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (JLMBM) : Jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
5. Jejaring Laboratorium Baku Pembanding : jumlah kegiatan kolaborasi pengembangan baku pembanding (penambahan 1 BP per tahun (2025-2029))

B. Jejaring internasional : $\frac{(\text{realisasi } a+b+c+d+e+f \text{ tahun } N)}{(\text{target } a+b+c+d+e+f \text{ 2025- 2029})} \times 100\%$

a = ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

b = ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

c = ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

d = South-East Asia Regulatory Network (SEARN): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (2 partisipasi/pertemuan per tahun).

e = Tobacco Laboratory Network (Toblabnet): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

f = GMFTN: Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

Target persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu adalah 42% yang harus dicapai di akhir tahun. Semua kegiatan jejaring telah berproses di tahun 2025, rekapitulasi aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 13 Kegiatan Jejaring Tahun 2025

No	Jejaring	Kegiatan
1	JLPPI	Bimbingan Teknis LRPPI terlaksana di tgl 18 September 2025
2	JLKI	• Pembahasan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama tentang JejaringLaboratorium Kosmetik Indonesia bersama Biro KS dan Biro Hukor pada 2 Mei 2025 • Pembahasan RoV on ISO PWI 24913 and collated comments pada tanggal 27 Mei 2025 sekaligus pembahasan Persiapan Uji Kolaborasi ISO PWI 24913 Dioksan antara PPPOMN sebagai Project Leader dengan Amerika sebagai Co Projecy • Finalisasi pembahasan perpanjangan PKS JLKI periode 2025 – 2029 dengan penambahan dua keanggotaan LPPOM MUI dan LST UI pada 19 Juni 2025 • Kegiatan Sidang ISO TC 217 TWG 3 sudah terlaksana tgl 11 Juli 2025 secara daring • Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama JLKI 2025-2029 tgl 14 November 2025 • Sosialisasi pada tanggal 14 November 2025: • SNI 9256:2024 Metode uji penentuan kadar 1,4 dioksan dalam produk kosmetik secara headspace kromatografi gas spektrometri massa • SNI 9347:2024 Metode uji Identifikasi dan penetapan kadar dietilen glikol DEG) dan etilen glikol (EG) dalam kosmetik secara kromatografi gas spektrometri massa • Metode Analisis Penentuan kadar Acrylamid dalam kosmetik secara LC MSMS metode nomor 02/KO/MA-PPPOMN/25 dan 09/KO/MA-PPPOMN/25 • Partisipasi secara langsung dalam Sidang ISO/TC 217 Cosmetics ke-31 dilaksanakan di Madrid Spanyol pada tanggal 1-5 Desember 2025
3	JLPOBA	• Bimbingan Teknis Pengujian dan Validasi-Verifikasi Kromatografi Lapis Tipis, 23 April 2025 • Pertemuan anggota JLPOBA tgl 16 Juli 2025 • Pembahasan Verifikasi Metode Analisis Pengujian Obat Bahan Alam (daring) pada tanggal 22 Desember 2025 dengan narasumber Prof. Dr. Mohamad Rafi, M.Si. (IPB) dan Dr.rer.nat. Catur Riani (ITB) untuk selanjutnya akan dilakukan Sosialisasi Pedoman Verifikasi Metode Analisis Pengujian Obat Bahan Alam ke seluruh Mitra JLPOBA dan UPT Badan POM
4	JLMBM	Kegiatan Jejaring JLPPI DNA dan Mikrobiologi terlaksana tanggal 12 dan 14 Agustus 2025.
5	JLBP	• Pembahasan PKS Percepatan Pengembangan Baku Pembanding tanggal 21 Mei 2025 • Kegiatan The 17th Meeting of the Production of ASEAN Reference Substances terlaksana tanggal 16-18 Juli 2025 di Thailand

No	Jejaring	Kegiatan
		• Penandatanganan PKS Percepatan Pemenuhan Baku Pembanding pada tanggal 14 November 2025 • Pelatihan sintesis turunan nitrosamin di Universitas Padjajaran tanggal 24 – 26 November 2025 • Pelatihan persiapan akreditasi dan awareness ISO 17034 di PT EBM Saintifik dan ITB tanggal 26 – 27 November 2025 (sebagai Narasumber) • Workshop jejaring lab baku pembanding tanggal 1 – 2 Desember 2025 • <i>Benchmarking</i> terkait sintesis/isolasi senyawa baku Pembanding di PRBBOOT, BRIN • Partisipasi uji profisiensi Ciprofloxacin dan kolaborasi ARS Atenolol (sebagai peserta)
6	APTLC	Task Force ke 2 APTLC dilaksanakan tgl 18 Juli 2025 membahas masukan Draft Guideline on Establishing ASEAN Pharmaceutical Method (APM)
7	ACTLC	• ACTLC meeting ke 24 tanggal 28-29 April 2025 • ACTLC Meeting tanggal 17-18 November 2025, di Jakarta
8	AFTLC	• Meeting tanggal 21 Maret 2025 • AFTLC meeting ke-26 tanggal 10-11 April 2025 • AFTLC - PFPWG Meeting tanggal 17-21 November 2025, di Phuket Thailand, Report kegiatan AFRL for Food Additives
9	SEARN	• SEARN first virtual meeting tanggal 11 Februari 2025 • SEARN second virtual meeting tanggal 24 April 2025
10	Toblabnet	• Ninth Meeting of the WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet) and Training of Laboratories, 08 - 12 December 2025, Wako-shi, Saitama, Japan (Indonesia menghadiri secara virtual)
11	GMFTN	• 22nd ASEAN GMFT Network Meeting sudah terlaksana 24-25 Juni 2025.

Capaian kinerja jejaring laboratorium obat dan makanan pada tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Suatu Jejaring Secara Terpadu" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	Target TW IV 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara Terpadu	-	42	42,4	100,95	 Baik

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini hingga TW III tahun 2025 di antaranya:

1. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator

- Komitmen Kelembagaan yaitu dukungan pimpinan dan institusi untuk memperkuat jejaring laboratorium, termasuk pengalokasian anggaran dan sumber daya.
- Standardisasi dan Akreditasi yaitu kapasitas laboratorium anggota jejaring telah memenuhi standar ISO/IEC 17025 serta penggunaan metode uji yang tervalidasi dan tersertifikasi secara nasional/internasional.
- Teknologi dan Infrastruktur yaitu adanya platform digital yang memungkinkan kegiatan pertemuan jejaring tanpa terbatas jarak dan waktu. Sistem digital juga mendukung pelaporan dan sharing knowledge antar laboratorium dapat berlangsung dengan efektif.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tersedianya SDM laboratorium yang kompeten dan terlibat aktif dalam jejaring laboratorium.
- Koordinasi dan Kolaborasi yaitu terselenggaranya forum koordinasi dan komunikasi rutin antar laboratorium jejaring (misalnya melalui rapat koordinasi, workshop, dan sistem early warning).

Tabel 15 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam sesuatu jejaring terpadu

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/REP/01	Kegiatan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu

	dalam sesuatu jejaring secara Terpadu							jejaring secara terpadu tidak dapat memenuhi target
--	---	--	--	--	--	--	--	---

2. Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator

- Keterbatasan infrastruktur dan anggaran yaitu belum semua laboratorium memiliki alat dan fasilitas yang sesuai standar untuk jenis pengujian tertentu. Yang paling krusial adalah isu efisiensi anggaran di tahun 2025 yang berdampak terhadap terbatasnya anggaran operasional untuk pengujian, pengiriman sampel, dan pemeliharaan peralatan.
- Ketimpangan kapasitas antar laboratorium yaitu perbedaan signifikan antar laboratorium yang terlibat dalam suatu jejaring dalam hal kompetensi SDM, peralatan, dan ruang lingkup pengujian. Ketimpangan tersebut kerjasama dalam lingkup jejaring tidak berjalan efektif
- Sistem informasi tidak terintegrasi yaitu laboratorium belum terkoneksi dalam satu sistem secara nasional atau regional.

c. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Agar kedepannya kegiatan jejaring dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dapat diusulkan beberapa upaya di antaranya:

- Peningkatan anggaran dan dukungan institusi untuk pengembangan jejaring laboratorium pengujian.
- Adanya regulasi atau pedoman teknis (misal, Peraturan Kepala BPOM) yang memperkuat peran jejaring laboratorium.
- Intensifikasi pelatihan rutin, benchmarking, dan peningkatan kapasitas bagi laboran di seluruh jejaring.
- Digitalisasi dan integrasi sistem jejaring agar pelaporan, validasi, dan rujukan hasil pengujian berjalan efisien.
- Monitoring evaluasi dan audit jejaring berkala untuk mengidentifikasi celah dan memperbaiki kinerja kolektif laboratorium jejaring obat dan makanan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jejaring laboratorium tahun 2025 yaitu:

1. Kegiatan jejaring terlaksana sesuai perencanaan yang berupa pelatihan/workshop, pertemuan/Forum Group Discussion, dan persiapan uji kolaborasi/profisiensi.
2. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor yang baik sehingga menjadi kunci keberhasilan pencapaian indikator ini.

2. Persentase pemenuhan laboratorium hijau

Laboratorium hijau adalah laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, operasional, serta pengelolaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Asesmen *Green Laboratory* adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja telah mengimplementasikan budaya kerja dengan prinsip laboratorium hijau untuk mendukung upaya keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Asesmen terdiri atas:

- a. Konservasi Energi
- b. Konservasi Air
- c. Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan
- d. Sumber dan Siklus Material

Nilai Pemenuhan UPT terhadap *Tools* Penerapan *Green Laboratory*

Cara Perhitungan dan formula:

Jumlah laboratorium

UPT = 35 (34 BBPOM/Balai POM lama + Balai POM Ende)

Persentase pemenuhan laboratorium hijau = Nilai Rata-Rata dari 35 Laboratorium UPT

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 16 Capaian Kinerja "Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau"

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	-	40	60	150	 Sangat baik

Pada tahun 2025, indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau ditetapkan dengan target sebesar 40. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 60, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 150% dari target dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Realisasi sebesar 60 tersebut merupakan rata-rata tingkat pemenuhan dari 35 UPT, yang diukur menggunakan *tools* asesmen *Green Laboratory* tahun 2025 yang telah disosialisasikan secara nasional sebagai instrumen penilaian yang terstandar. Nilai realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar UPT telah memulai dan mengimplementasikan praktik laboratorium hijau secara sistematis, tidak lagi pada tahap inisiasi atau komitmen administratif semata. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan telah mulai terintegrasi dalam operasional laboratorium sehari-hari.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Selama tahun 2025, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau hingga melampaui target tidak terlepas dari beberapa faktor strategis yang saling memperkuat, yaitu:

1. Sosialisasi *tools* asesmen *Green Laboratory* dilakukan secara detail, sistematis, dan menyeluruh kepada 35 UPT.
2. Terdapat komitmen yang kuat dari UPT dalam mengintegrasikan prinsip laboratorium hijau ke dalam operasional sehari-hari.
3. Implementasi *Green Laboratory* didorong melalui mekanisme kompetisi/lomba antar UPT. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun motivasi intrinsik dan semangat perbaikan berkelanjutan.

Tabel 17 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	-	PPPOMN menginisiasi proses sertifikasi laboratorium melalui My	Pembenahan internal PPPOMN	2026-2029	Ya	PPPOMN/REP/02	Belum adanya sertifikasi eksternal/internasional

			Green Lab (MGL) – USA sebagai lab percontohan	menuju sertifikasi My Green Lab (MGL)				
--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	--

c. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai kelanjutan dari hasil Lomba Penerapan *Green Laboratory*, upaya perbaikan yang dapat dilakukan ialah pembenahan Internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL). Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan laboratorium hijau secara konkret dan berskala internasional, Tim *Green Laboratory* akan melanjutkan proses pembenahan internal di PPPOMN untuk memenuhi standar sertifikasi dari My Green Lab (MGL) – USA. Agenda ini diharapkan dapat memperkuat budaya keberlanjutan di lingkungan laboratorium BPOM, mendorong perbaikan menyeluruh secara bertahap, dan menjadikan PPPOMN sebagai laboratorium percontohan nasional yang tersertifikasi secara internasional dalam penerapan *Green Laboratory*.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau pada tahun 2025 didukung oleh rangkaian program dan kegiatan yang dirancang secara terstruktur, tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada kualitas proses implementasi.

1. Sosialisasi *Tools* Asesmen *Green Laboratory*

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara komprehensif kepada seluruh UPT, mencakup pemaparan indikator, metode pengukuran, standar pembuktian, serta contoh implementasi di lapangan. Pendekatan ini memastikan adanya kesamaan pemahaman antar-unit, meminimalkan perbedaan interpretasi terhadap kriteria penilaian, serta meningkatkan kesiapan UPT dalam memenuhi aspek-aspek yang dinilai. Sosialisasi yang sistematis menjadi pondasi penting dalam membangun *baseline* implementasi yang seragam.

2. Penilaian Berbasis Data dan Verifikasi Lapangan

Proses penilaian dirancang setransparan dan seakuntabel mungkin melalui mekanisme unggah dokumen pendukung (*evidence-based assessment*) yang dilengkapi dengan visitasi atau verifikasi lapangan pada unit tertentu. Model ini mendorong UPT untuk tidak hanya menyatakan pemenuhan, tetapi juga membuktikannya secara terukur dan terdokumentasi. Pendekatan berbasis data meningkatkan kredibilitas hasil penilaian

sekaligus memperkuat budaya tertib administrasi dan tata kelola laboratorium yang baik.

3. Pemberian Apresiasi kepada Unit dengan Capaian Terbaik

Pemberian apresiasi kepada 5 UPT dengan skor tertinggi berfungsi sebagai instrumen motivasional. Pengakuan formal atas kinerja yang baik mendorong terciptanya kompetisi yang sehat, meningkatkan kebanggaan institusional, serta memicu unit lain untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Strategi ini efektif dalam menggeser implementasi dari sekadar kewajiban menjadi upaya peningkatan kualitas yang proaktif.

4. Pendampingan bagi UPT dengan Tingkat Pemenuhan Rendah

Bagi UPT yang memperoleh skor relatif lebih rendah, dilakukan pendampingan dan pembinaan secara terarah. Pendampingan difokuskan pada identifikasi *gap* terhadap kriteria asesmen, penyusunan rencana aksi perbaikan, serta pemberian arahan teknis sesuai kebutuhan masing-masing unit. Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan capaian tidak hanya terpusat pada unit tertentu, tetapi bergerak secara lebih merata.

3. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium

Digitalisasi Laboratorium adalah integrasi teknologi dan alat digital ke dalam pengaturan laboratorium (yang telah ada) untuk meningkatkan dan merampingkan berbagai proses. Transformasi ini melibatkan penggunaan perangkat digital, perangkat lunak, dan sistem manajemen data, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam pengujian, pengembangan pengujian.

Beberapa lingkup digitalisasi laboratorium :

- a. Pengelolaan Sampel
- b. Pengelolaan Instrumen/alat laboratorium
- c. Pengelolaan inventory (Reagen, Media, Suku Cadang, Baku Pembanding, bahan habis pakai lain)
- d. Pengelolaan Metode
- e. Pengelolaan Data Uji
- f. Pengelolaan Dokumen Mutu dan Rekaman
- g. Pelaporan
- h. Ketertelusuran
- i. Pelayanan Publik
- j. Organisasi/Pengelolaan SDM
- k. Automasi Instrumen

Laboratorium digitalisasi Badan POM adalah laboratorium yang sudah melakukan pengujian / pengembangan metode yang hasilnya berupa sertifikat pengujian / metode analisis yang telah disahkan.

Jumlah laboratorium :

UPT = 42 (34 BBPOM/Balai POM lama + 8 Balai POM baru)

Pusat = 4 (PPPOMN + 3 UPT)

Persentase penerapan digitalisasi laboratorium di laboratorium BPOM = penjumlahan persentase penerapan digitalisasi dari 46 laboratorium BPOM berdasarkan tools (A) dibagi jumlah laboratorium BPOM

= A / 46

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 18 Capaian Kinerja "Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	Indikator baru	30	49,2	164	 Sangat baik

Pada tahun 2025 indikator Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium ditetapkan target sebesar 30. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi hasil yang dicapai 49,2 sehingga tingkat capaian kinerja 164% dari target dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Realisasi sebesar 49.2 tersebut merupakan persentase dari penjumlahan penerapan digitalisasi dari 46 laboratorium Badan POM berdasarkan tools asesmen implementasi digitalisasi laboratorium tahun 2025 yang telah di isi dan dilengkapi oleh setiap UPT di Badan POM. Nilai realisasi capaian tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi yang baik antara unit pusat dan UPT dalam mendorong transformasi digital di seluruh laboratorium Badan POM. Capaian ini akan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas dan integrasi sistem digital laboratorium secara berkelanjutan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Selama tahun 2025, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium hingga melampaui target tidak terlepas dari beberapa faktor strategis yang saling memperkuat, yaitu:

1. Penyusunan pedoman digitalisasi laboratorium
2. Penyusunan pedoman LIMS
3. Penyusunan tools untuk mengukur implementasi laboratorium
4. Sosialisasi digital laboratorium dengan UPT Badan POM
5. Asesmen implementasi digitalisasi laboratorium

Tabel 19 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Implementasi Digitalisasi Laboratorium	-	-	-	-	Ya	PPOMN/STRA/06	Kegiatan Digitalisasi Laboratorium tidak dapat memenuhi target persentase GD Penguatan Lab Pengujian OM

c. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai tindak lanjut Tim Digitalisasi merencanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Pembahasan hasil *assesment* digitalisasi laboratorium yang akan di kordinasikan dengan Pusdatin
2. Pemeliharaan dan usulan peningkatan LIMS di PPPOMN
3. Pembahasan dokumen pedoman sistem pengelolaan laboratorium secara digital
4. Review pedoman digitalisasi laboratorium

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan digitalisasi laboratorium pada Triwulan III didukung oleh serangkaian kegiatan yang berfokus pada penyempurnaan rancangan sistem serta penguatan kesiapan implementasi di lapangan.

Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan adalah review daftar pereaksi laboratorium untuk mendukung pengembangan modul Reagensia pada SIPT. Kegiatan ini dilakukan guna menstandarkan data pereaksi yang digunakan di berbagai laboratorium, sehingga proses integrasi ke dalam sistem digital dapat dilakukan secara akurat dan efisien. Hasil review ini menjadi dasar penting bagi penyusunan struktur data dan parameter yang akan diterapkan pada modul reagensia SIPT.

Selain itu, dilaksanakan pula pembahasan teknis dengan narasumber dan pihak terkait dalam rangka penyusunan pedoman serta penyelarasan tools digitalisasi laboratorium. Pembahasan ini bertujuan untuk memperkuat pedoman agar lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan operasional di UPT. Kegiatan ini memberikan ruang diskusi yang konstruktif antara tim digitalisasi, narasumber, dan UPT dalam merumuskan strategi penerapan digitalisasi yang adaptif terhadap kondisi yang sebenarnya.

Selanjutnya, assessment implementasi digitalisasi laboratorium telah dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan, hambatan, serta potensi perbaikan pada masing-masing UPT. Assessment ini menghasilkan data dan informasi yang sangat berguna bagi perencanaan lanjutan, termasuk identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur TIK, dan standardisasi alur kerja laboratorium.

4. Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan laboratorium BPOM berdasarkan kedekatan letak geografis, moda transportasi, dan kemampuan pengujian. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sistem kerja laboratorium yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM, Laboratorium UPT BPOM dikelompokkan menjadi 8 regional yaitu regional Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Manado, Makassar, Surabaya dan Jayapura. Implementasi regionalisasi laboratorium diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPOM dalam mewujudkan sistem pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif

terhadap dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui pengaturan laboratorium berbasis regional pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran dapat dilakukan lebih optimal, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan *post market* berbasis pengujian laboratorium.

Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium diukur melalui komponen:

- a. Capaian terhadap perencanaan sampling dan pengujian
- b. Produktivitas pengujian
- c. Responsivitas
- d. Kapasitas
- e. Sustainability

Cara Perhitungan dan formula:

$$\text{Nilai efektivitas regionalisasi laboratorium} = (30\% \times a) + (35\% \times b) + (5\% \times c) + (15\% \times d) + (15\% \times e)$$

Kriteria Efektivitas

Nilai (%)	Kriteria	Deskripsi	Keterangan
≥ 90	Efektif	Regionalisasi Laboratorium dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian dan memberikan dampak bagi kinerja BPOM	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan dengan peningkatan berkelanjutan
70-89	Cukup Efektif	Regionalisasi Laboratorium cukup dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian, perlu intervensi Unit Kerja Pusat terkait dan Koordinator Region	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan, perlu perbaikan tidak mendasar
< 70	Kurang Efektif	Regionalisasi Laboratorium kurang dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian, perlu intervensi pimpinan yang terkait	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan, perlu perbaikan Mendasar

Selain pengukuran efektivitas menggunakan indikator di atas, Pokja Kajian Strategis juga perlu melakukan analisis efisiensi dan analisis tren perkembangan capaian dari tahun ke tahun, serta mendalami hal-hal khusus yang berpengaruh terhadap implementasi regionalisasi laboratorium secara keseluruhan. Faktor yang berpengaruh tersebut dapat mencakup kebijakan dan SOP, pola pembagian tugas dan klusterisasi, pola distribusi personil, dan sebagainya. Hasil analisis diharapkan dapat memberi gambaran kondisi saat serta menjadi dasar pijakan untuk perbaikan ke depan.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 20 Capaian Kinerja "Nilai Efektifitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	Target 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	Indikator baru	77	78,2	101,56	 Sangat baik

Capaian indikator kinerja "Nilai Efektifitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium" dibandingkan terhadap target indikator kinerja tahun 2025 tercapai 101,56% dengan kategori sangat baik.

Perolehan realisasi indikator kinerja 78,2% dihitung dengan menjumlahkan bobot progress dari seluruh komponen efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium yaitu:

1. Perencanaan (bobot 30%)
 - Sampling Balai Besar/Balai/Loka POM = 10,4% (bobot 12,5%)
 - Pengujian Balai Baru/LokaPOM = 4,8% (bobot 5%)
 - Pengujian Balai Besar/Balai POM = 11,8% (bobot 12,5%)
2. Produktivitas (bobot 35%)
 - Pemenuhan terhadap Timeline = 18,4% (bobot 20%)
 - *Turn Around Time* = 3,0% (bobot 5%)
 - Penguji = 4,3% (bobot 10%)
3. Responsivitas (bobot 5%)
 - Waktu Tunggu (UPT lama) = 0,9% (bobot 3,5%)
 - Waktu Tunggu (UPT baru) = 0,8% (bobot 1,5%)
4. Kapasitas (bobot 15%)
 - Jenis dan Jumlah Pengujian Spesifik = 10,8% (bobot 12%)

- Instrument (LC-MS/MS) = 1,4% (bobot 3%)
5. Sustainability (bobot 15%)
- Peningkatan Kompetensi = 6,0% (bobot 7,5%)
 - Instrument Terkalibrasi = 5,6% (bobot 7,5%)

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Selama tahun 2025, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Faktor penyebab keberhasilan pemenuhan indikator ini dikarenakan keenam komponen regionalisasi laboratorium dilaksanakan sesuai perencanaan.

Tabel 21 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/HUK/01	Pengujian Unggul tidak dapat terlaksana pada masa persiapan penerapan regionalisasi laboratorium di Regional Jayapura

c. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya akan terus dilakukan PPPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja “Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium” yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium secara berkala.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator ini mencapai target yang ditetapkan karena beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain:

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium yang dilakukan rutin setiap triwulan yaitu, TW IV tahun 2024, TW I, TW II, dan TW III tahun 2025
- Pendampingan Pengujian untuk seluruh UPT pada masing-masing Regional secara daring pada TW II dan III tahun 2025

5. Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar

Laboratorium eksternal adalah laboratorium di luar Badan POM yang memiliki ruang lingkup pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium eksternal termasuk perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan dan atau memenuhi kebutuhan Industri termasuk UMKM Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam pemastian keamanan dan mutu produknya. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sediaan Farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peluang pengujian sediaan farmasi yang dapat dilakukan oleh laboratorium eksternal mencakup pengujian dengan tingkat kesulitan tinggi. Kemampuan melakukan pengujian Sediaan Farmasi dibuktikan melalui keikutsertaan uji profisiensi /uji kolaborasi dan/pengujian Sediaan Farmasi sesuai dengan ruang lingkup rekognisi oleh Badan POM. Kegiatan yang dilakukan yaitu verifikasi kesesuaian dengan pedoman/juknis BPOM dan kegiatan pendampingan untuk ruang lingkup parameter uji yang akan di rekognisi.

Cara perhitungan:

Persentase laboratorium eksternal yang telah didampingi dan mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar dengan parameter yang telah ditetapkan dihitung berdasarkan jumlah laboratorium eksternal yang didampingi BPOM pada tahun N. Target pendampingan 20 laboratorium selama periode renstra atau 4 laboratorium setiap tahun.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 22 Capaian Kinerja "Jumlah Laboratorium Eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar"

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Laboratorium Eksternal Yang Mampu Melakukan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Sesuai Standar	-	20	20	100	 SANGAT BAIK

Capaian kinerja indikator "Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar" dibandingkan terhadap target indikator kinerja tahun 2025 tercapai 100% dengan kategori sangat baik.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan kinerja adalah sebagai berikut:

- Adanya potensi bahwa jumlah laboratorium eksternal yang memenuhi persyaratan rekognisi tidak mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen dari unit terkait terhadap perlunya pendampingan laboratorium eksternal

Tabel 23 Matriks Rekomendasi TW IV Persentase Laboratorium Esternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Laboratorium Eksternal Yang Mampu Melakukan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Sesuai Standar	Adanya perubahan kebijakan pelaksanaan maupun kebutuhan pendampingan Lab Eksternal	- Menyusunjuknis pendampingan lab eksternal yang adaptif - Penyusunan POA Pendampingan lab eksternal	- Identifikasi perubahan persyaratan teknis - Reviewjuknis pendampingan lab eksternal - Menyusun PoA pendampingan lab eksternal	TW-3 tahun 2026	Ya	PPPOMN/REP/32	Pendampingan Laboratorium eksternal tidak terlaksana sesuai perencanaan

c. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Peningkatan kinerja dalam melaksanakan pendampingan laboratorium Eksternal Penyedia Jasa Pengujian Obat dan Bahan Obat menuju Rekognisi Laboratorium pada periode Renstra tahun 2025-2029 akan terus dilakukan. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan unit-unit terkait dan laboratorium eksternal bahwa rekognisi meningkatkan kredibilitas, peluang kerja sama industri, dan kepercayaan regulator.
- Menyusun *Plan of Action* untuk pelaksanaan pendampingan laboratorium eksternal.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan kemampuan laboratorium Eksternal pada tahun 2025 tidak terlepas dari penyusunan perencanaan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja. Salah satu faktor utama adalah merencanakan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pendampingan laboratorium eksternal. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang terlaksana pada tahun 2025 yaitu:

- Visitasi 4 Laboratorium Eksternal tanggal 2-10 Juli 2025
- Penyusunan CAPA oleh Lab Eksternal
- Pembahasan hasil verifikasi CAPA Agustus-September 2025 oleh Tim Pendamping Laboratorium Eksternal dengan melibatkan Direktorat Standar ONPPZA dan Direktorat KMEI
- Sosialisasi Keputusan Kepala Badan POM No 424 tahun 2025 tentang Pedoman Rekognisi Lab Eksternal pada 19 September 2025
- Pembahasan usulan tarif layanan rekognisi laboratorium pada tanggal 3 September 2025 dan 17 November 2025 dengan narasumber dari Ditjen PNBK Kementerian Keuangan.

SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA LABORATORIUM BPOM SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

IK 2. NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM. Jumlah komponen pemenuhan SKL sesuai dengan tingkatan Laboratorium. Pemenuhan Laboratorium BPOM terhadap SKL tahun 2025 dihitung berdasarkan penjumlahan pemenuhan SKL setiap tingkatan Laboratorium. dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Tingkat 5 = $(35\% \times \text{Nilai Pemenuhan SKL Tingkat 5})$

Tingkat 4 = $(22,5\% \times \text{Rata-rata Balai Regional}) + (2,5\% \times \text{Rata-rata masing-masing UPT PPPOMN: BPKOM, BPPB, Balai Kalibrasi})$

Tingkat 3 = $(20\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 3})$

Tingkat 2 = $(10\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 2})$

Tingkat 1 = $(5\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 1})$

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 24 Capaian Kinerja "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan laboratorium	91,18	68,5	69,83	101,95	 SANGAT BAIK

Dari target Nilai SKL BPOM tahun 2025 sebesar 68,5% terealisasi sebesar 69,83% sehingga capaiannya adalah 101,95% dengan kategori sangat baik.

Realisasi sebesar 69,83% merupakan Nilai SKL BPOM yang dihitung berdasar penjumlahan pemenuhan SKL setiap tingkatan dengan perhitungan:

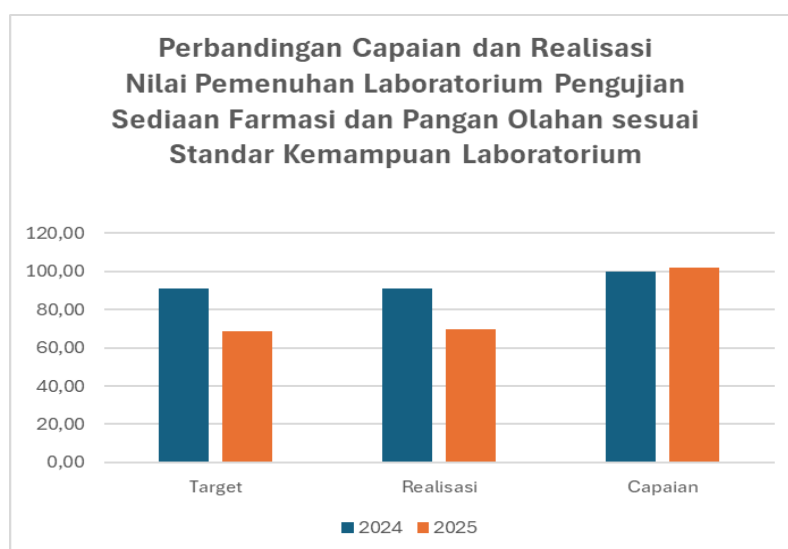
$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (35\% \times 80,27\%) + (22,5\% \times 79,80\%) + (2,5\% \times 83,55\%) + (2,5\% \times 91,98\%) \\ &\quad + (2,5\% \times 89,87\%) + (20\% \times 74,80\%) + (10\% \times 14,85\%) + (5\% \times 14,10\%) \\ &= 69,83\% \end{aligned}$$

sedangkan untuk capaian tahun 2025 sebesar 101,95% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Tahun 2025} &= (69,83 / 68,50) \times 100\% \\ &= 101,95\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Capaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pemenuhan Nilai SKL Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian target pada awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga target Tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 25 Capaian Kinerja "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2029

No	INDIKATOR	TARGET Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	82,0	69,8	85,16	 AKAN TERCAPAI

Realisasi kinerja indikator kinerja “Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” pada tahun 2025 sebesar 69,8% dengan target akhir renstra sebesar 82,0% sehingga capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra sebesar 85,16% dengan kategori Akan Tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator ini hanya ada di PPPOMN saja, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Hal ini sesuai tugas dan fungsi PPPOMN sebagai Laboratorium dan mempunyai sasaran strategis meningkatnya laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Seluruh UPT BPOM Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 dapat memenuhi target SKL. Namun dalam proses pemenuhan target SKL Tingkat 3 dan 4 di tahun 2025, UPT BPOM mengalami kendala, antara lain:
 - Permasalahan pada pemenuhan SRL: jenis sampel yang direncanakan tidak tersampling, reagensia masih proses pengadaan, keterbatasan ketersediaan sampel.

- Permasalahan pada verifikasi metode: Terdapat beberapa verifikasi metode analisa dan verifikasi standar ruang lingkup yang belum dilaksanakan karena adanya penumpukan jumlah sampel di laboratorium.
- Permasalahan pada peralatan: kebijakan efisiensi anggaran BPOM yang mengalami beberapa kali perubahan pada Januari - Februari 2025 menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan alat laboratorium.

Kendala tersebut dapat diatasi oleh UPT BPOM dengan menerapkan tindak lanjut yang memadai dan adanya dukungan dan pendampingan oleh PPPOMN sehingga pada akhir tahun 2025 target SKL dapat terpenuhi.

2. Pada pelaksanaan SKL Tingkat 1 dan 2 terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja, antara lain:

- Keterbatasan ruangan dan sarana prasarana menjadi kendala dalam penambahan alat laboratorium di sebagian besar UPT. Hal ini disebabkan status gedung yang masih pinjam pakai atau sewa, sehingga pengembangan fasilitas belum optimal. Selain itu, beberapa UPT belum memiliki ruang laboratorium mikrobiologi yang sesuai persyaratan teknis.
- Sebagian besar UPT dalam pemenuhan SKL masih terfokus pada ruang lingkup pengujian Obat (rapid test) dan Tes Kit Pangan. Pengujian untuk ruang lingkup lain seperti Kosmetik, OBA, dan SK belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersediaan reagen dan peralatan, serta masih terbatasnya kompetensi personel penguji pada bidang tersebut.
- Jumlah dan kompetensi personel penguji masih terbatas dalam melaksanakan verifikasi metode uji, baik untuk pengujian kimia maupun mikrobiologi. Selain itu, keterbatasan reagen dan peralatan laboratorium turut membatasi pengembangan serta pelaksanaan ruang lingkup pengujian.
- Personel penguji masih merangkap tugas pada fungsi lain akibat keterbatasan jumlah SDM. Kondisi ini menyebabkan waktu pelaksanaan pengujian menjadi terbatas, sehingga diperlukan pengaturan jadwal dan penugasan personel yang menyesuaikan dengan ketersediaan waktu penguji
- Beberapa UPT memiliki kapasitas daya listrik yang belum memadai apabila seluruh peralatan laboratorium, termasuk pendingin ruangan (AC), dioperasikan secara bersamaan saat kegiatan pengujian berlangsung.

Tabel 26 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	SKL Tingkat 3 dan 4: - Pemenuhan SRL: jenis sampel yang direncanakan tidak tersampling, reagensia masih proses pengadaan, keterbatasan ketersediaan sampel. - Standar metode terverifikasi: terdapat beberapa verifikasi metode analisa dan verifikasi standar ruang lingkup yang belum dilaksanakan karena adanya penumpukan jumlah sampel di laboratorium - Kebijakan efisiensi anggaran BPOM yang mengalami beberapa kali perubahan pada Januari - Februari 2025 menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan alat laboratorium.	- Melakukan koordinasi dengan tim inspeksi terkait penyiapan sampel yang sulit diperoleh. - Akan dilanjutkan pada TW selanjutnya. - Mengusulkan penurunan target tw 2 dan 3 ke Roren dan sudah disetujui.	Melakukan pemantauan progres pelaksanaan pemenuhan ruang lingkup, peralatan dan metode terverifikasi serta evaluasi capaian secara berkala (tiap TW) untuk memastikan target SKL terpenuhi		Ya	PPOMN /STRA/03	Menurunnya capaian nilai pemenuhan SKL
		SKL tingkat 1 dan 2 : • Keterbatasan sarana dan prasarana untuk penambahan alat laboratorium disebagian besar UPT, karena gedung masih berstatus pinjam pakai atau sewa dan beberapa UPT belum memiliki ruang laboratorium mikrobiologi. • Sebagian besar UPT pemenuhan SKL masih terfokus pada ruang lingkup pengujian Obat (rapid test) dan Tes Kit Pangan, belum melakukan pengujian untuk ruang lingkup lain seperti Kosmetik, OBA, dan SK dikarenakan ketersediaan reagen dan peralatan yang	Loka dan Balai POM agar membuat perencanaan untuk pengusulan pemenuhan sarana prasarana yang memadai baik ruang laboratorium, peralatan, reagensia dan pendukung pengujian. Loka dan Balai POM membuat perencanaan peningkatan kompetensi penguji terutama terkait verifikasi metode analisis, agar pelaksanaan	Monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL tiap triwulan.		Ya	PPOMN /STRA/03	

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		belum terpenuhi serta keterbatasan kompetensi personil pengujian terkait pengujian OBA, SK dan Kosmetik. - Jumlah personil dan kompetensi pengujian yang masih terbatas dalam melakukan verifikasi metode uji baik untuk pengujian kimia maupun mikrobiologi serta keterbatasan reagen, alat laboratorium, sehingga ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan masih terbatas. - Personel pengujian masih merangkap melakukan tugas dari fungsi selain pengujian karena keterbatasan jumlah SDM, sehingga waktu untuk melakukan pengujian terbatas dan harus ada pengaturan personel dalam melakukan pengujian menyesuaikan waktu dari pengujian. - Beberapa UPT kapasitas listrik belum memadai apabila semua alat elektronik termasuk AC dinyalakan secara bersamaan dengan melakukan pengujian	pengujian dapat berjalan untuk semua komoditi dan pemenuhan SKL meningkat secara bertahap. Loka POM dan Balai POM agar membuat perencanaan peningkatan kompetensi personel pengujian terutama terkait Perlu ditetapkan personel pengujian dengan tugas pokok melakukan kegiatan laboratorium dengan jumlah yang memadai. UPT BPOM dengan kapasitas listrik yang belum memadai agar membuat usulan peningkatan kapasitas listrik sesuai kebutuhan					

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan kinerja ke depan terus dilakukan oleh PPPOMN dalam rangka pemenuhan indikator kinerja “Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”, melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan Ruang Lingkup Pengujian.
Dilakukan dengan memperluas parameter uji yang relevan dengan dinamika dan tantangan pengawasan, termasuk pengujian berbasis risiko serta isu emerging contaminants, bahan berbahaya, dan cemaran baru pada obat, kosmetik, obat tradisional dan pangan olahan.
2. Peningkatan Kompetensi SDM Penguji
Melalui bimbingan teknis, workshop, serta penguatan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan instrumen analisis terkini (misalnya teknologi kromatografi dan spektrometri mutakhir), agar selaras dengan perkembangan teknologi produksi Obat dan Makanan serta isu aktual pengawasan.
3. Intervensi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai
Dilaksanakan melalui pendampingan intensif kepada Balai, meliputi asistensi teknis, monitoring dan evaluasi berkala, review dokumen mutu, serta penguatan implementasi sistem manajemen mutu laboratorium.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Peralatan Laboratorium
Melakukan pemetaan kebutuhan peralatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan alat yang tersedia, percepatan pengadaan alat strategis, serta pemeliharaan dan kalibrasi berkala guna memastikan kesiapan operasional dan keandalan hasil pengujian.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja “Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” antara lain :

1. Kegiatan Pendampingan Pengujian dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengujian Laboratorium BPOM.
2. Workshop Evaluasi Hasil Pendampingan Pengujian.
3. Pelatihan pengujian Unggul di laboratorium Regional.
4. Pengembangan metode analisis, pengembangan baku pembanding, pengujian sampel Obat dan Makanan (obat, bahan obat, NAPPZA, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, dan rokok) serta kalibrasi alat laboratorium.
5. Program peningkatan kompetensi SDM Penguji melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
6. Program pelaksanaan verifikasi metode analisis di BB/Balai POM.

IK 3. PERSENTASE METODE ANALISIS YANG DIKEMBANGKAN SESUAI KEBUTUHAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

Metode analisis (MA) adalah metode pengujian yang dikembangkan oleh PPPOMN, yang digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, mikrobiologi dan biologi molekuler. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah banyaknya metode analisis kimia dan biologi sesuai kebutuhan pengawasan hingga tahun 2029. Jumlah MA yang sudah dikembangkan oleh PPPOMN hingga tahun 2024 adalah 2213. Jumlah tersebut termasuk 75 MA yang dikembangkan oleh Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) sebagai UPT di Lingkungan PPPOMN. Jumlah MA yang digunakan sebagai baseline PPPOMN pada periode Renstra 2025-2029 mengalami pengurangan sebanyak 75 MA menjadi 2138 karena BPPB saat ini sudah menjadi Satker mandiri. Berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan, jumlah MA yang dikembangkan ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 134 MA per tahun. Kebutuhan MA hingga 2025 adalah sebanyak 2.272 MA. Di tahun 2026 menjadi 2.406 MA, tahun 2027 menjadi 2.504 MA, tahun 2028 menjadi 2.674 MA, dan target MA sampai dengan akhir periode renstra tahun 2029 adalah 2.808 MA.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 27 Capaian Kinerja Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	100	80,91	80,77	99,83	 BAIK

Jumlah MA yang dikembangkan sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 130 MA terdiri dari:

- MA pengujian kimia obat, bahan obat, NAPPZA (KOBONAPPZA) = 37 MA
- MA pengujian kimia obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan = 18 MA
- MA pengujian kimia kosmetik = 15 MA
- MA pengujian pangan olahan = 27 MA

- MA pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler (MBM) termasuk BSL 3 = 33 MA

Perhitungan realisasi MA yang dikembangkan hingga tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{(2138 \text{ (capaian hingga tahun 2024)} + 130 \text{ (capaian Tahun 2025)})}{2808 \text{ (target periode akhir Renstra)}} \times 100$$

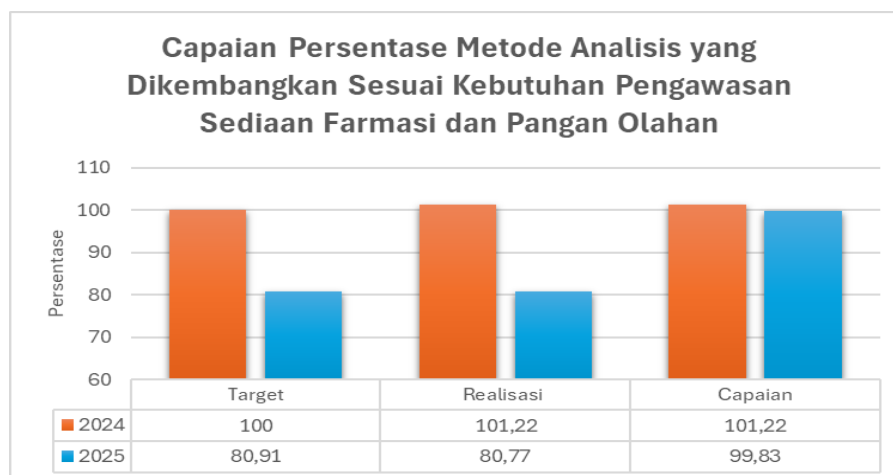
$$= 80,77\%$$

Capaian indikator kinerja “Persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” dihitung dengan cara membandingkan realisasi pada tahun 2025 terhadap target indikator kinerja tahun 2025, sehingga diperoleh hasil capaian 99,83% dengan kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja pada IKU Persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,39% dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi/pemblokiran anggaran pada awal tahun, yang kemudian dibuka pada bulan Oktober sehingga mempengaruhi proses pengembangan MA dalam hal waktu penyediaan alat fungsional, media dan reagensia yang dibutuhkan yang bersifat inden.

Target 2025 mengalami penurunan dipengaruhi oleh penyesuaian target pada awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Selain itu, definisi operasional untuk indikator tersebut pada periode Renstra 2025-2029 berbeda dengan sebelumnya dan tahun 2025 merupakan periode awal Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam mekanisme perhitungan realisasi metode analisis (MA), jumlah target MA yang digunakan sebagai pembagi adalah total target MA pada akhir periode Renstra Tahun 2029, yaitu sebesar 2.808 MA. Dengan demikian, secara proporsional realisasi pada Tahun 2025 terlihat lebih rendah karena baseline target telah disesuaikan dengan total target jangka menengah lima tahunan.



Gambar 3 Capaian Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 24 Capaian Kinerja "Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" terhadap target Tahun 2025

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	100	80,8	80,77	 AKAN TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian kinerja indikator “Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” pada tahun 2025 sebesar 80,8% dengan target akhir renstra sebesar 100,0% sehingga capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra sebesar 80,77% dengan kriteria “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan unit kerja atau instansi lain, karena hanya PPPOMN yang memiliki tugas mengembangkan metode analisis pengujian Obat dan Makanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pasal 133 yang menyatakan bahwa Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator ini antara lain:

- PPPOMN memiliki dokumen perencanaan dalam mengembangkan metode analisis, namun pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran/efisiensi anggaran sehingga mempengaruhi target MA yang direncanakan semula 134 MA kemudian mengalami penyesuaian menjadi 57 MA.
- Pengadaan reagen, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional untuk pengembangan MA disesuaikan dengan jumlah MA yang telah mengalami penyesuaian internal sesuai anggaran yang tersedia.
- Pengembangan MA menyesuaikan dengan kasus yang terjadi pada tahun berjalan sehingga ada penambahan MA yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- PPPOMN melaksanakan koordinasi dengan universitas dalam melaksanakan pengembangan metode analisis mikrobeads dalam kosmetik, dimana PPPOMN tidak memiliki sumber daya peralatan dan bahan fungsional untuk pengembangan MA ini.
- PPPOMN melaksanakan koordinasi dengan laboratorium eksternal dan industri untuk pengadaan bahan baku yang diperlukan dalam pengembangan metode analisis Retinal dan Retinol.
- Pembukaan blokir anggaran pada bulan Oktober tidak dapat dialokasikan untuk pengembangan MA karena penyediaan reagen/media membutuhkan waktu dalam proses pengadaannya. Dengan adanya pembukaan blokir tersebut maka target MA kembali ke target awal yaitu 134 MA.
- Akhir tahun 2025, PPPOMN dapat menyelesaikan 130 MA dari target 134 MA dengan memanfaatkan reagen, media, dan bahan fungsional yang tersedia sehingga capaian di tahun 2025 adalah 99,83%.

Tabel 28 Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan jumlah target MA yang direncanakan mengalami penyesuaian internal. Pemblokiran baru dibuka bulan Oktober namun tidak dapat dialokasikan untuk pengembangan MA karena dibutuhkan waktu dalam hal penyediaan alat fungsional atau reagensia yang bersifat inden	Pengembangan metode analisis merupakan salah satu <i>core business process</i> di PPPOMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Oleh karena itu, capaian kinerja pada kegiatan ini perlu mendapat perhatian khusus dan dimonitor secara berkelanjutan.	Penyesuaian target MA yang dikembangkan tahun 2026 sesuai anggaran yang tersedia	TW 1 Tahun 2026	Ya	PPPOMN/OP/13	Terhambatnya pengembangan MA pengujian Kimia - Mikrobiologi dan Biologi Molekular
				Penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung capaian indikator ini agar target penyesuaian yang telah ditetapkan tercapai.	TW 2 Tahun 2026			

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

PPPOMN terus melakukan berbagai upaya untuk menjawab tantangan pengawasan dengan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengembangan metode analisis Obat dan Makanan pada periode Renstra tahun 2025-2029. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

- Pengembangan metode analisis merupakan salah satu *core business process* di PPPOMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Oleh karena itu, capaian kinerja pada kegiatan ini perlu mendapat perhatian khusus dan dimonitor secara berkelanjutan. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan secara proporsional dan berbasis kinerja guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada indikator *Persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan*, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

- Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung pengujian, seperti instrumen laboratorium, baku pembanding, reagen, bahan fungsional sebelum dilaksanakannya pengembangan metode analisis.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Peningkatan kompetensi SDM Penguji melalui bimbingan teknis, workshop, pelatihan, training, seminar baik teori maupun praktik di laboratorium, baik teknis pengujian maupun sistem manajemen mutu.
- Pengadaan sarana prasarana pengujian untuk mengembangkan metode analisis seperti instrumen laboratorium, bahan fungsional, reagen, baku pembanding, dan sampel.
- Pemeliharaan dan kalibrasi instrumen laboratorium, baik peralatan utama maupun pendukung tepat waktu sesuai perencanaan.
- Pertemuan pembahasan hasil verifikasi dan hasil validasi metode analisis bersama Tenaga Ahli dari perguruan tinggi dan Direktorat Pengawasan terkait.
- Evaluasi/konsultasi/koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian.
- Penerapan sistem mutu di laboratorium.
- Mengidentifikasi metode analisis terkini yang relevan dan dapat diadopsi atau diadaptasi dalam pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang dikembangkan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, standar internasional, serta kebutuhan pengawasan berbasis risiko.
- Peningkatan fungsi investigasi, monitoring dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan
- Perluasan kerjasama maupun koordinasi dengan universitas, industri dan laboratorium eksternal untuk pengembangan metode analisis.

IK 4. PERSENTASE BAKU PEMBANDING YANG DIKEMBANGKAN SESUAI KEBUTUHAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

Baku Pembanding merujuk pada standar acuan yang digunakan untuk membandingkan hasil suatu pengujian. Baku Pembanding (BP) terdiri dari Baku Pembanding Kimia dan Baku Pembanding Mikroba dalam bentuk kering. Baku Pembanding Kimia adalah Baku Pembanding yang dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas oleh PPPOMN dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Baku Pembanding Mikroba adalah Baku Pembanding yang diproduksi kembali/dikembangkan oleh PPPOMN. Baku Pembanding yang ditetapkan adalah Baku Pembanding kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan hingga tahun 2029 yaitu sebanyak 1633.

- a. Jumlah BP yang ditetapkan pada tahun berjalan sesuai kebutuhan = Jumlah Sertifikat BP yang diterbitkan PPPOMN hingga tahun berjalan;
- b. Target Jumlah Sertifikat baku pembanding yang diterbitkan hingga tahun 2029 (kumulatif) = 1633 sertifikat;
- c. Target kumulatif penerbitan sertifikat baku pembanding hingga tahun 2029 ditetapkan sebanyak 1.633 sertifikat, dengan rincian tahunan sebagai berikut: 1.307 sertifikat pada tahun 2025, 1.387 sertifikat pada tahun 2026, 1.468 sertifikat pada tahun 2027, 1.550 sertifikat pada tahun 2028, dan mencapai 1.633 sertifikat pada tahun 2029.

Indikator persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah baku pembanding yang telah diterbitkan hingga tahun berjalan dengan target kumulatif pada akhir tahun Renstra 2029 dikali 100%.

Persentase Baku pembanding yang dikembangkan sesuai Kebutuhan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan =

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah Sertifikat BP yang diterbitkan PPPOMN hingga tahun berjalan
- Target Jumlah Sertifikat baku pembanding yang diterbitkan hingga tahun 2029 (kumulatif) = 1633 sertifikat

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

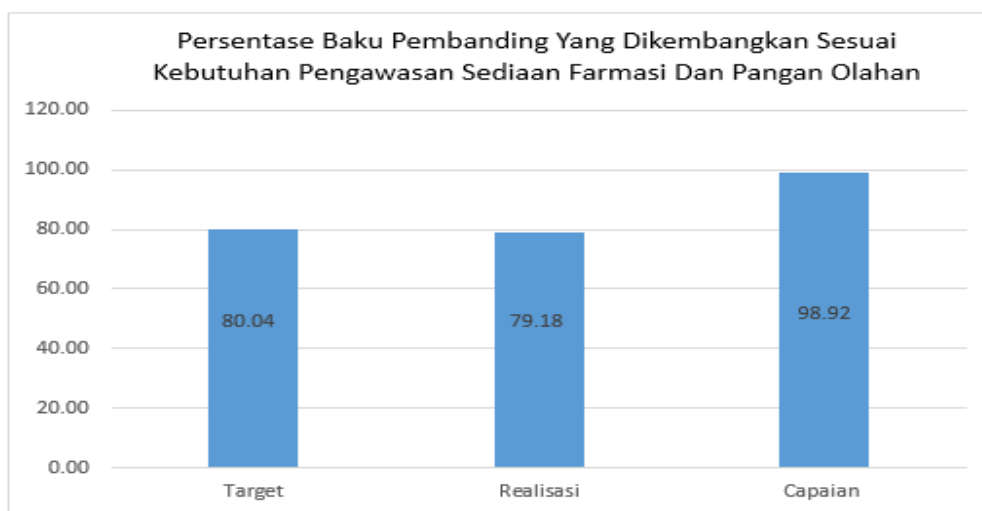
Tabel 29 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW IV 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase Baku Pembanding Yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	100	80,04	79,18	98,92	 BAIK

Pada tahun 2025, realisasi output baku pembanding yang dikembangkan sebanyak 66 baku pembanding yang terdiri dari 52 baku pembanding kimia dan 14 baku pembanding mikroba, sehingga realisasi indikator "Persentase Baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" pada tahun 2025

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(1227(\text{capaian hingga tahun 2024}) + 66(\text{capaian Tahun 2025}))}{1633(\text{target periode akhir Renstra})} \times 100\% \\
 &= 79,18\%
 \end{aligned}$$

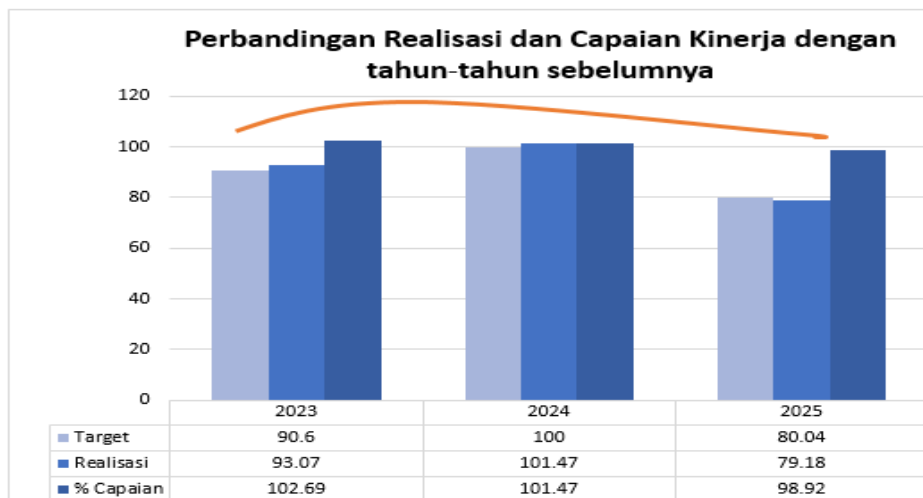
Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian realisasi indikator kinerja tahun 2025 "Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" adalah sebesar 98,92% dengan kategori **Baik**.



Gambar 4 Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tren capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Tren Capaian Indikator Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2023 - 2025

Persentase capaian indikator kinerja “Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Persentase capaian pada tahun 2023 yaitu 102.69%, tahun 2024 yaitu 101,47%, dan tahun 2025 yaitu 98,47%. Sedangkan, realisasi tahun 2023 sebesar 93.07%, tahun 2024 meningkat menjadi 101,47% dan pada tahun 2025 menurun menjadi 79,18%. Perbedaan pada persentase capaian dipengaruhi oleh target dan realisasi tiap tahun.

Target 2025 mengalami penurunan dipengaruhi oleh penyesuaian target pada awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Selain itu, definisi operasional untuk indikator tersebut pada periode Renstra 2025-2029 berbeda dengan sebelumnya dan tahun 2025 merupakan periode awal Renstra sehingga sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam mekanisme perhitungan realisasi baku pembanding, jumlah target baku pembanding yang digunakan sebagai pembagi adalah total target baku pembanding pada akhir periode Renstra Tahun 2029, yaitu sebesar 1633 BP. Dengan demikian, secara proporsional realisasi pada tahun 2025 terlihat lebih rendah karena baseline target telah disesuaikan dengan total target jangka menengah lima tahunan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 30 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" terhadap target Tahun 2025

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase Baku Pembanding Yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	100	79,2	79,18%	 AKAN TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja indikator “Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” pada Tahun 2025 sebesar 79,2% dengan target akhir renstra sebesar 100,0% sehingga capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra sebesar 79,18% dengan kriteria “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan kinerja indikator “Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya efisiensi/pemblokiran anggaran sehingga anggaran pengadaan untuk pengembangan baku pembanding terbatas baik bahan baku, baku primer, reagen, suku cadang, dan bahan fungsional. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan baku pembanding yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan obat dan makanan sehingga terjadi kegagalan dalam memenuhi capaian kinerja.
- Keberhasilan kinerja indikator dapat terealisasi dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional serta keterlibatan ahli/pakar dalam memastikan proses pengembangan baku pembanding berjalan efektif

Tabel 31 Matriks Rekomendasi Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Target baku pembanding tidak tercapai karena adanya efisiensi/pemblokiran anggaran sehingga anggaran pengadaan untuk pengembangan baku pembanding terbatas baik bahan baku, baku primer, reagen, suku cadang, dan bahan fungsional	Target baku pembanding yang dikembangkan tahun 2026 disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Penyesuaian target baku pembanding yang dikembangkan tahun 2026 sesuai anggaran yang tersedia	TW I Tahun 2026	Y	PPPOMN/REP/30	Pengembangan BP tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan secara kualitas

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

PPPOMN perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengembangan baku pembanding pada periode Renstra tahun 2025-2029 untuk menjawab tantangan pengawasan. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

- Penyesuaian target baku pembanding yang dikembangkan tahun 2026 sesuai anggaran yang tersedia.
- Perencanaan pengembangan baku pembanding mempertimbangkan tuntutan kebutuhan pengawasan obat dan makanan, termasuk kasus pelanggaran, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta munculnya penyakit baru (new emerging disease). Jika terdapat isu aktual yang menjadi fokus pengawasan, maka pengembangan baku pembanding harus diprioritaskan dengan penyesuaian perencanaan sesuai skala prioritas.
- Monitoring dan evaluasi capaian baku pembanding yang ditetapkan dilakukan setiap bulan sehingga akan segera terlihat jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut.
- Meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan lembaga internasional serta membangun sistem *knowledge management* agar pengalaman pengembangan dapat terdokumentasi dan dimanfaatkan untuk proyek selanjutnya.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berbagai upaya dilakukan PPPOMN untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan” antara lain:

- Perencanaan jangka menengah pengembangan baku pembanding tahun 2025-2029 berupa penyusunan *roadmap* target pengembangan baku pembanding yang terukur setiap tahun, sehingga arah kegiatan jelas, konsisten, dan dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengawasan.
- Monitoring dan evaluasi capaian baku pembanding yang ditetapkan dilakukan setiap bulan sehingga akan segera terlihat jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut.
- Melakukan kajian pada akhir tahun 2024 mengenai metode pengujian untuk pengembangan Baku Pembanding yang direncanakan akan dikembangkan pada tahun 2025 bersama tenaga ahli.
- Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas laboratorium serta peralatan uji untuk mendukung pengembangan baku pembanding yang lebih cepat, akurat, dan sesuai standar.

SASARAN KEGIATAN 3

LAYANAN PUBLIK PPPOMN YANG PRIMA

IK 5. INDEKS PELAYANAN PUBLIK PPPOMN

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (24%)
- Profesionalitas SDM (25%)
- Sarana Prasarana (18%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
- Konsultasi dan Pengaduan (10%)
- Inovasi (12%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

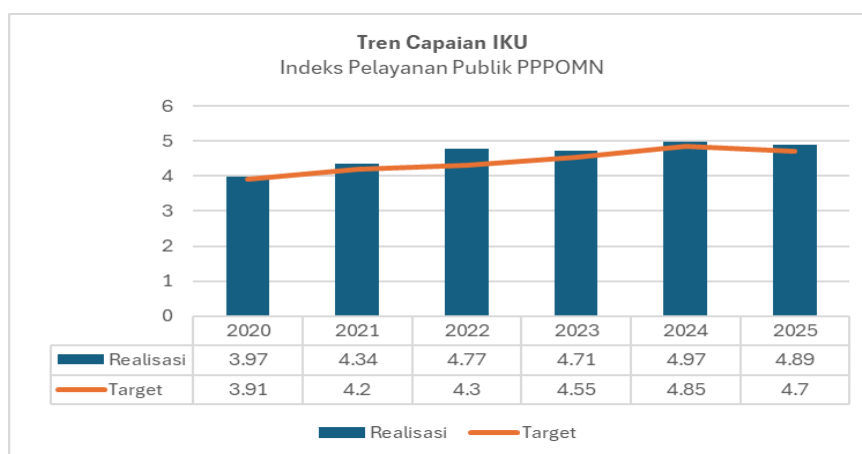
Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) PPPOMN pada tahun 2025 sebesar 4,89 dengan capaian terhadap target 104,04%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja IPP sangat baik.

Tabel 32 Capaian Kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Layanan Publik PPPOMN yang Prima	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,97	4,7	4,89	104,04	 Sangat Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka trend capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Tren Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Berdasarkan grafik tren capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) PPPOMN Tahun 2020–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan kinerja secara konsisten sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta efektivitas strategi peningkatan mutu layanan yang telah dilaksanakan.

Pada Tahun 2025, nilai IPP tercatat sebesar 4,89. Secara angka, terdapat sedikit penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024. Namun demikian, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pelayanan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tools atau instrumen penilaian IPP yang digunakan

pada Tahun 2025, sehingga hasil penilaian Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode Tahun 2020–2024.

Dengan demikian, meskipun secara nominal terjadi penurunan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, capaian nilai 4,89 tetap menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik berada pada kategori sangat baik. Perubahan metode penilaian menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan hasil tersebut, sehingga analisis tren perlu mempertimbangkan aspek metodologis dalam evaluasi kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Layanan Publik PPPOMN dengan Target Akhir Renstra Tahun 2029

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,9	4,9	99,80	 AKAN TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja indikator “Indeks Pelayanan Publik PPPOMN” pada Tahun 2025 sebesar 4,9% dengan target akhir renstra sebesar 4,9% sehingga capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra sebesar 99,80% dengan kriteria “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) PPPOMN pada Tahun 2025 adalah sebesar 4,89 dengan kategori **Pelayanan Prima**. Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat, nilai tersebut menempatkan PPPOMN pada peringkat ke-12 dari total 21 unit pelayanan publik BPOM Pusat yang dinilai, seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Biro Hukum dan Organisasi	4,70	4,96	4,97	4,96	Pelayanan Prima
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,94	4,99	4,95	Pelayanan Prima
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	5,00	4,79	4,95	Pelayanan Prima
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	4,05	4,93	5,00	4,95	Pelayanan Prima
5	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,70	5,00	4,81	4,95	Pelayanan Prima
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,92	4,95	4,93	Pelayanan Prima
7	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,70	4,97	4,8	4,93	Pelayanan Prima
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
10	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	4,94	4,76	4,90	Pelayanan Prima
11	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	4,88	4,98	4,90	Pelayanan Prima
12	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,70	4,86	4,98	4,89	Pelayanan Prima
13	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,87	4,92	4,88	Pelayanan Prima
14	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,70	4,87	4,93	4,88	Pelayanan Prima
15	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,60	4,87	4,79	4,85	Pelayanan Prima
16	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,40	4,85	4,84	4,85	Pelayanan Prima
17	Balai Pengujian Produk Biologi	4,40	4,97	4,44	4,84	Pelayanan Prima
18	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,70	4,81	4,90	4,83	Pelayanan Prima
19	Direktorat Registrasi Obat	4,70	4,79	4,80	4,79	Pelayanan Prima
20	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	4,78	4,79	4,78	Pelayanan Prima
21	Balai Kalibrasi	4,40	4,33	4,76	4,44	Sangat Baik

Hasil ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang tergolong baik dan mencerminkan bahwa mutu layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan, serta menunjukkan konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Secara umum, capaian ini menjadi indikator positif bagi organisasi dalam menjaga dan meningkatkan performa pelayanan publik secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan penguatan strategi guna mencapai hasil yang lebih optimal pada periode berikutnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

1. Konsistensi dalam Mempertahankan Budaya Pelayanan Prima
Keberhasilan capaian IPP didukung oleh komitmen organisasi dalam menjaga budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nilai-nilai profesionalisme, responsivitas, integritas, dan akuntabilitas terus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga kualitas layanan dapat terjaga secara konsisten.

2. Perbaikan Standar Pelayanan secara Partisipatif melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

Penyempurnaan standar pelayanan dilakukan melalui pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian standar layanan dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

3. Publikasi Informasi Layanan yang Konsisten dan Informatif
Penyediaan dan pemutakhiran informasi layanan secara berkala melalui berbagai media komunikasi resmi turut memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap layanan. Keterbukaan informasi ini mendukung peningkatan kepercayaan publik serta meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam proses pelayanan.

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Secara Berkelanjutan
Pelaksanaan evaluasi berkala, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan, menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara sistematis.

5. Dukungan Manajemen dan Koordinasi Internal yang Efektif
Komitmen pimpinan serta sinergi antar unit kerja berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan. Dukungan manajerial yang kuat memungkinkan pelaksanaan program peningkatan mutu layanan berjalan secara terarah dan berkesinambungan.

Tabel 33 Matriks Rekomendasi TW IV Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Aplikasi Infalabs sering mengalami gangguan (error/slow response) dan belum dilengkapi beberapa fitur pendukung seperti notifikasi status layanan Belum seluruh petugas pelayanan publik memiliki pelatihan	Penguatan stabilitas sistem dan pengembangan fitur layanan digital berbasis kebutuhan pengguna Program peningkatan kompetensi pelayanan publik berbasis standar pelayanan publik	Koordinasi dengan Pusdatin untuk pengembangan dan pemutakhiran Infalabs Pelaksanaan pelatihan service excellence - Evaluasi pasca pelatihan (pre-post test &	TW II 2026 TW III 2026	Ya	PPPOMN/REP/06	Indeks pelayanan publik PPPOMN tidak meningkat sesuai target yang ditetapkan

		husus pelayanan prima (service excellence)		survei pengguna)				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terus dilakukan PPPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik PPPOMN”, antara lain:

1. Penguatan internalisasi budaya pelayanan prima secara berkelanjutan kepada pegawai terutama para petugas layanan.
2. Optimalisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
3. Penyempurnaan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik secara lebih partisipatif dan inklusif.
4. Peningkatan inovasi layanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
5. Konsistensi publikasi dan pemutakhiran informasi layanan pada seluruh kanal resmi.
6. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan teknis dan pelayanan publik.
7. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara periodik dan terukur.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator “Indeks Pelayanan Publik PPPOMN”, beberapa aktivitas telah dilakukan PPPOMN hingga Triwulan IV tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan perilaku petugas layanan publik, serta dilakukan penilaian petugas layanan per TW dan pemberian apresiasi terhadap petugas layanan melalui penyerahan Service Excellent Certificate per TW.
2. Tindak lanjut atas layanan konsultasi dan pengaduan dilakukan secara periodik yaitu per triwulan. Semua permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan disampaikan oleh pelanggan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan

Organisasi dalam rangka pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada setiap unit penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM.

4. Melakukan *update* layanan informasi publik PPPOMN secara berkala diberbagai media yang mudah diakses oleh stakeholder.
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala dan penyampaian hasil survey di media sosial secara terbuka dan mudah diakses serta melakukan tindak lanjut atas saran dan masukan dari pelanggan.
6. Pembuatan dan pemutakhiran bahan publikasi seperti flyer, buku saku dan souvenir Infalabs.
7. Pembuatan dan pemutakhiran bahan publikasi seperti flyer, buku saku dan souvenir Infalabs.

SASARAN KEGIATAN 4

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

IK 6. NILAI PEMBANGUNAN ZI PPPOMN

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Pembangunan ZI di Badan POM mengacu pada PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 289 tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penilaian implementasi ZI di PPPOMN dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yaitu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan POM untuk melakukan evaluasi/penilaian, pemantauan dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja yang sedang membangun ZI. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM tahun 2025 pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam Surat No. B- PI.06.06.7.08.25.235, menunjukkan bahwa Hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas

(PMPZI) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar 91,66, dengan komponen sebagai berikut :

1. Bobot komponen pengungkit:

- Manajemen Perubahan: 7,10%
- Penataan Tatalaksana: 6,38 %
- Penataan Sistem Manajemen SDM: 9,76%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja: 8,99%
- Penguatan Pengawasan: 13,16%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: 9,70%

2. Bobot komponen hasil:

- Birokrasi bersih dan akuntabel: 19,74
- Nilai survei persepsi korupsi: 17,24
- Capaian kinerja lebih baik: 2,50
- Pelayanan publik yang prima: 16,84
- Nilai persepsi kualitas pelayanan (IPP): 16,84

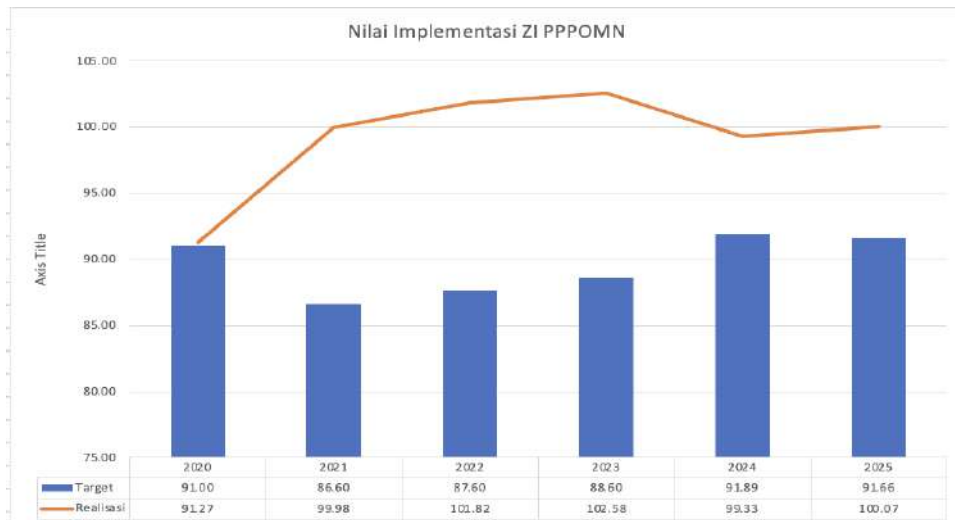
a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 34 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" terhadap Target Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	Target 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,27	91,59	91,66	100,07%	 SANGAT BAIK

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka trend capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 7 Nilai Implementasi ZI PPPOMN

Dari gambar diatas terlihat bahwa:

- Tahun 2020: dari target 91,00 terealisasi 83,06 dengan capaian 91,27%
- Tahun 2021: dari target 86,60 terealisasi 86,58 dengan capaian 99,98%
- Tahun 2022: dari target 87,60 terealisasi 89,19 dengan capaian 101,82%
- Tahun 2023: dari target 88,60 terealisasi 90,89 dengan capaian 102,58%
- Tahun 2024: dari target 91,89 terealisasi 91,27 dengan capaian 99,33%
- Tahun 2025: dari target 91,59 terrealisasi 91,66 dengan capaian 100,07%

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 35 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" terhadap target akhir tahun Renstra (2029)

No	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	93,75	91,66	97,77 %	 Akan tercapai

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja kinerja “Nilai Pembangunan ZI PPPOMN” pada Tahun 2025 sebesar 91,66% dengan target akhir renstra sebesar 93,75% sehingga capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra sebesar 97,77% dengan kriteria “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN dengan unit kerja lainnya

NO.	UNIT KERJA	NILAI PEMBANGUNAN ZI
1.	Direktorat Pengawasan Kosmetik	92,49
2.	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	92,34
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91,66
4.	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,59
5.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91,29
6.	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	90,30
7.	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,09
8.	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	88,90
9.	Direktorat Registrasi Obat	88,07

Berdasarkan hasil evaluasi nilai implementasi ZI di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN berada pada urutan ke 3 dari 9 unit kerja, seperti tercantum pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan nilai PPPOMN tergolong baik dalam mengimplementasikan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pemenuhan indikator Indeks RB dapat tercapai didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi secara berkala implementasi ZI di PPPOMN untuk seluruh area perubahan dan *Agen of Change* Kegiatan ini penting dilaksanakan untuk mengawal pemenuhan target komponen pengungkit dan komponen hasil pada setiap triwulan serta mengatasi kendala yang dihadapi.
2. Review Implementasi ZI oleh Auditor Internal.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian oleh Auditor Internal.
4. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian implementasi ZI oleh Inspektorat Utama.
5. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Utama.
6. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

7. Peningkatan peran organisasi dalam sistem pengaduan yang berkadar pengawasan dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang sudah diakui dengan adanya akreditasi ISO 37001:2016
8. Mengembangkan aplikasi layanan publik PPPOMN
9. Meningkatkan nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sehingga Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,85 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,94 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Meskipun nilai implementasi ZI di PPPOMN pada tahun 2025 mencapai target, PPPOMN tidak dapat diusulkan oleh Tim Penilai Internal yaitu Inspektorat sebagai Unit Kerja untuk meraih predikat WBBM karena PPPOMN hanya memperoleh nilai Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Hal ini terjadi karena pemenuhan indikator kinerja lebih baik yang dapat dibandingkan dengan tahun 2024, tidak mencapai 50%.

Tabel 37 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Pembangunan ZI PPPOMN

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/STRA/08 PPPOMN/REP/20	PPPOMN tidak dapat meraih WBBM Nilai manajemen perubahan RB PPPOMN tidak memenuhi target indeks RB yang ditetapkan

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja terus dilakukan PPPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja “Nilai Implementasi ZI” dan persyaratan lain yang mendukung pengusulan sebagai salah satu unit yang berpredikat WBBM antara lain:

1. Melakukan reviu terhadap SK mekanisme penentuan tim ZI dan menetapkan kriteria dengan ukuran yang jelas serta melengkapi dokumentasi pemilihan tim pembangunan dalam kertas kerja pemilihan ketua dan anggota tim ZI.
2. Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam kegiatan monev pembangunan ZI serta mengidentifikasi kendala serta rencana tindak lanjut pada monev pembangunan ZI secara berkala dan mendokumentasikan tindak lanjutnya.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara konsisten dan menindaklanjuti hasil monev.
4. Memastikan seluruh pegawai pengelola akuntabilitas kinerja telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja.
5. Melakukan monev atas penerapan WBS secara berkala serta menyusun dan mendokumentasikan rencana aksi tindak lanjut atas monev yang telah dilakukan.
6. Melakukan monev atas kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan serta mendokumentasikan hasil monevnya.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi inovasi pada pelayanan publik serta menganalisis dampak inovasi (sebelum dan sesudah) terkait perbaikan pelayanan publik.
8. Melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat yang telah direncanakan.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara rutin beserta monitoring dampak dan akibatnya.
10. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
11. Pada tahun 2026 perlu dilakukan upaya agar pemenuhan seluruh indikator tercapai 100 % atau lebih dan pemenuhan indikator yang dapat dibandingkan dengan tahun 2024 lebih baik sebanyak minimal 50 %, supaya dapat diusulkan oleh Inspektorat sebagai unit kerja untuk meraih predikat WBBM.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang pencapaian keberhasilan pencapaian kinerja adalah

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan target seluruh indikator dan mengatasi kendala yang terjadi.
2. Meningkatkan program/kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan publik PPPOMN.
3. Peningkatan peran organisasi dalam sistem pengaduan yang berkadar pengawasan dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang sudah diakui dengan adanya akreditasi ISO 37001:2016.
4. Penyusunan dan reviu dokumen perencanaan berdasarkan data capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
5. Penyelasan perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta penyusunan laporan kinerja yang transparan, berbasis data dan tepat waktu.
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui bimbingan teknis dan *coaching*.

IK 7. NILAI AKIP PPPOMN

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 dan 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Fokus evaluasi SAKIP PPPOMN meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome).

Ruang Lingkup evaluasi SAKIP pada PPPOMN meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PPPOMN tahun 2025 adalah 85 yang dinilai pada akhir tahun. Penilaian tersebut didasarkan pada lima komponen:

1. Perencanaan kinerja (24)
2. Pengukuran kinerja (24)
3. Pelaporan kinerja (12)

4. Evaluasi internal (20)

5. Capaian kinerja (20)

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 38 Capaian Kinerja Nilai AKIP PPPOMN terhadap target Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai AKIP PPPOMN	84,4	85	80,47	94,67%	 Baik

Target nilai AKIP PPPOMN tahun 2025 sebesar 85. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, PPPOMN memperoleh nilai sebesar 80,47 dengan kategori A, sehingga capaian nilai AKIP PPPOMN tahun 2025 sebesar 94,67% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Dari gambar diatas terlihat bahwa :

- Tahun 2021: dari target 77,20 terealisasi 80,22 dengan capaian 103,91%
- Tahun 2022: dari target 78,70 terealisasi 83,99 dengan capaian 106,72%
- Tahun 2023: dari target 80,20 terealisasi 84,40 dengan capaian 105,24%
- Tahun 2024 : dari target 85,25 terealisasi 84,52 dengan capaian 99,14%
- Tahun 2025 : dari target 85 teralisasi 80,47 dengan capaian 94,67%

Realisasi Nilai AKIP PPPOMN dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

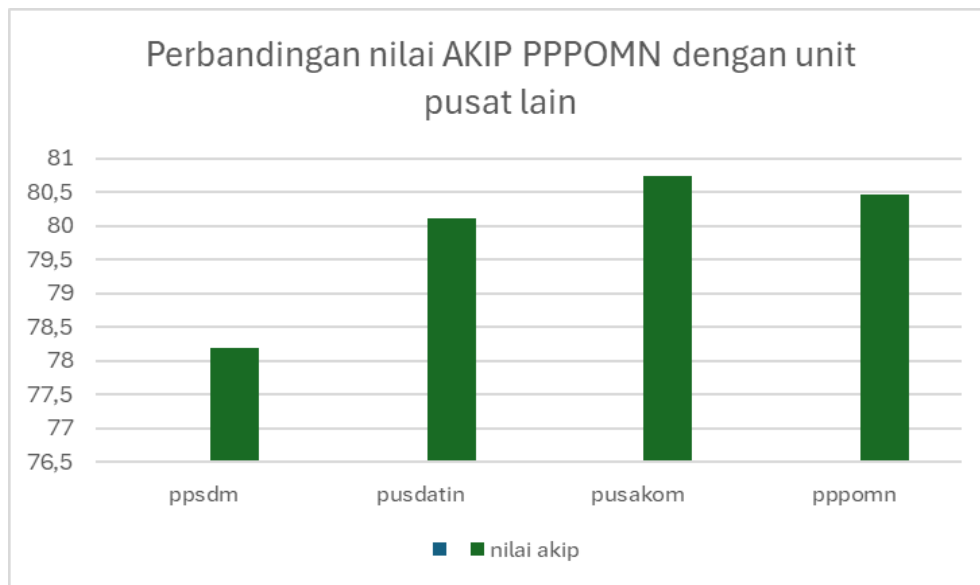
Tabel 39 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" terhadap target tahun 2025

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai AKIP PPPOMN	87	80,47	92,49%	 Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator kinerja “Nilai AKIP PPPOMN” pada tahun 2025 sebesar 80,47 dengan target akhir renstra sebesar 87% sehingga capaian indikator kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 92,49% dengan kriteria “akan tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) unit kerja/satuan kerja pusat lainnya (Eselon 2 Mandiri) di BPOM yaitu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), maka nilai AKIP keempat satuan kerja tersebut adalah:



Gambar 8 Perbandingan Nilai AKIP PPPOMN dengan unit pusat lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat di lihat bahwa Nilai AKIP yang tertinggi adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) dengan 80,75. PPPOMN berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Pusakom.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Beberapa kendala yang menyebabkan belum terpenuhinya target adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

- kertas kerja reviu target tahun 2025 belum mendokumentasikan penerapan target final/akhir (sesuai dengan PK tahun 2025) dan informasi terkait perubahan target
- perbedaan total anggaran pada perjanjian kinerja tanggal

- perbedaan nomenklatur indikator kinerja pada dokumen PK, RAPK, SKP Simakin dan Laporan Kinerja Interim
 - Ada 2 indikator yang tidak tercapai karena ada pemblokiran anggaran karena tidak bisa mengejar target membutuhkan by proses, by output dan by uang tidak bisa instan. Untuk IKU yang tidak tercapai, untuk tahun ini dimungkinkan untuk menurunkan target pada saat anggaran dikurangi. Terkait pengurangan target, dapat dikonsultasikan untuk pengurangan target. Namun PPPOMN sudah mengusulkan tetapi ditolak oleh biro perencanaan dan keuangan BPOM, karena perubahan target tidak dibuka oleh Kementerian Keuangan. Jika ada kejadian seperti hal tersebut, langkah yang bisa dilakukan ada bukti kalau sudah mengajukan usulan perubahan. Ada bukti bahwa implementasi SAKIP di unit kerja berjalan
2. Pengukuran Kinerja
- Manual IKU belum sesuai ketentuan
 - Instruksi Kerja Umum Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan PPPOMN dan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja PPPOMN belum mengatur terkait : PIC/pelaksana langkah aktivitas; Mutu baku waktu (timeline); Mekanisme jika terjadi perbaikan/perubahan data, antara lain: Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; tahap perbaikan pelaporan data.
 - Perbedaan penyajian realisasi indikator pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim
 - Belum melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
3. Pelaporan Kinerja
- Laporan kinerja tahun 2024 belum menjelaskan terkait perubahan target indikator pada BAB II perencanaan kinerja
 - terdapat perubahan target antara review renstra (13 Desember 2021) dengan PK 2024 (10 September 2024)
 - Laporan kinerja tahun 2024 menyajikan matriks tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024, namun belum menyajikan matriks tindak lanjut rekomendasi per indikator sesuai dengan perjanjian kinerja
 - Laporan kinerja tahun 2024 belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran per sasaran dan indikator yang terdiri dari upaya efisiensi yang dilakukan dan penyebab terjadinya ketidak efisienan
 - pengisian realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 pada aplikasi simetris belum di lakukan secara tertib.

- Terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi simetris, seperti pada beberapa IKU di triwulan IV, tahun 2024 untuk IP ASN PPPOMN dan presentasi realisasi penggunaan produk dalam negeri.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan untuk mencapai target kinerja 2025 yaitu :

- Penyusunan perencanaan kinerja PPPOM meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Manual IKU.
- Menyusun kertas kerja revidi target indikator kinerja secara lengkap dan informatif sehingga memudahkan untuk perhitungan capaian indikator tersebut
- Penyelarasan nomenklatur, target dan capaian realisasi pada dokumen PK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Interim, SKP dan SIMETRIS
- Setiap ada perubahan target, definisi operasional, cara perhitungan dapat disampaikan pada Bab II Laporan Kinerja.
- Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan tahunan dengan memanfaatkan data kinerja yang *up to date*.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap bulan.
- Menindaklanjuti rekomendasi desk Evaluasi SAKIP tahun 2025

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala setiap bulan, sehingga setiap kendala/ permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja dapat segera dilakukan tindak lanjut.
- Evaluasi internal secara berkala setiap triwulan, dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya.
- Melakukan pemantauan kinerja individu secara berkala setiap triwulan (siklus pendek) dan tahunan.
- Tindak lanjut terhadap rekomendasi penilaian SAKIP tahun sebelumnya.
- Melakukan revisi terhadap indikator kinerja, target maupun definisi operasional yang sudah tidak sesuai.
- Tindak lanjut perbaikan data saat desk penilaian SAKIP tahun 2025

Tabel 40 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai AKIP PPPOMN

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP PPPOMN	Dalam pencapaian Indikator Nilai AKIP tidak memenuhi target yang ditetapkan karena menurunnya capaian output dan outcome PPPOMN tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya	- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja output dan outcome (indikator) secara berkala - Penyesuaian target output dan indikator 2026 sesuai anggaran yang tersedia - Penguatan koordinasi dengan inspektorat terkait LKE dan tindak lanjut LHE AKIP	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala - Melakukan penyesuaian target output dan indikator 2026 karena adanya efisiensi/pemblokiran anggaran - Permohonan pendampingan Inspektorat terkait LKE dan Tindak Lanjut LHE AKIP	TW I dan II tahun 2026	Ya	PPPOMN/STRA/11 PPPOMN/STRA/12	Perencanaan yang dilakukan tidak memenuhi target nilai AKIP PPPOMN yang ditetapkan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak memenuhi target nilai AKIP PPPOMN yang ditetapkan

IK 8. NILAI KINERJA ANGGARAN PPPOMN

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai IKPA antara lain :

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Hal III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian Rincian Output (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2025

Nilai Kinerja = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Tabel 41 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 42 Capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN TW IV Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	Target 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	95.84	5 (90,01 s.d. 100)	5 (97,33)	100	 Sangat Baik

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran} &= (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%) \\
 &= (94,65 \times 50\%) + (100 \times 50\%) \\
 &= 47,33 + 50 \\
 &= 97,33 \text{ (Konversi Nilai 5)}
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 mengalami perubahan manual IKU dari tahun-tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya target dan realisasi menggunakan persentasi dari nilai EKA dan IKPA, tetapi pada tahun 2025 menggunakan konversi nilai dengan masing-masing kategori. Atas dasar tersebut maka capaian kinerja NKA tidak bisa dibandingkan antara target, realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya.

Namun jika dilihat dari nilai persentasi nilai EKA dan IKPA, realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,52% dari tahun 2024 (dari 95,84 ke 97,33).

Tabel 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian NKA Tahun 2025 dan 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	93,23	95,84	102,80%
2025	5	5	100,00%

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Realisasi kinerja indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN” pada tahun 2025 sebesar 5 dengan target akhir renstra sebesar 5, sehingga capaian indikator kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 100% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”.

Tabel 44 Capaian Kinerja "Nilai Kinerja Anggara PPPOMN terhadap target tahun 2025"

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra (2029)	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	5	100%	 Tercapai/ melampaui

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Tahun 2025 PPPOMN menduduki urutan ke-tujuh dari seluruh unit kerja pusat. Jika dibandingkan dengan pusat-pusat (PUSDATIN, PUSAKOM dan PPSDM), maka PPPOMN menduduki urutan ke-tiga setelah PUSDATIN dan PUSAKOM seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 45 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan unit kerja lainnya

No.	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	100,00	100,00	100,00
2	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	100,00	98,94	99,47

No.	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
3	BALAI KALIBRASI	100,00	97,66	98,83
4	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	100,00	97,16	98,58
5	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	100,00	96,78	98,39
6	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98,56	98,00	98,28
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	94,65	100,00	97,33
8	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	96,75	96,65	96,70
9	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	100,00	90,90	95,45
10	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	96,25	93,94	95,10
11	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	89,85	96,53	93,19
12	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	79,39	98,22	88,81
13	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	63,96	93,57	78,77

Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu per 3 Februari 2026

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi DIPA yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran setiap jenis belanja per bulan.
3. Penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk setiap jenis belanja per triwulan.
4. Penandatanganan kontrak barang/jasa dan belanja modal kontraktual dengan nilai 50 juta s.d 200 juta diselesaikan pada triwulan I
5. Penyelesaian tagihan yang dilaksanakan tepat waktu maksimal 17 Hari Kerja
6. Pengelolaan UP/TUP dilakukan secara tepat waktu dan akurat dan penggunaan UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah)

7. Capaian output dilaporkan tepat waktu dan akurat
8. Surat Perintah Membayar disampaikan ke KPPN tepat waktu sehingga tidak adanya Dispensasi Surat Perintah Membayar
9. Penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dalam perencanaan anggaran serta melakukan efisiensi SBK.

Faktor penyebab kurang optimalnya nilai perencanaan anggaran sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya komponen nilai capaian rincian output untuk Metode Analisa dan Baku Pembanding yang dikembangkan karena adanya efisiensi/pemblokiran anggaran sehingga mempengaruhi capaian RO tersebut menjadi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Tidak dilakukannya penyesuaian target setelah adanya pemblokiran anggaran.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu:

1. Melakukan penyesuaian target setelah adanya pemblokiran anggaran sehingga target berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia.
2. Berkoordinasi dengan pihak yang terkait beserta dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penyesuaian target sehingga nilai capaian output bisa maksimal dengan ketersediaan anggaran yang tersedia.

Tabel 46 Matriks Rekomendasi TW IV Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan jumlah MA dan Baku Pembanding yang dikembangkan mengalami	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala sehingga capaian output berbanding lurus dengan	Penyesuaian target MA dan Baku Pembanding yang dikembangkan tahun 2026 sesuai anggaran yang tersedia	TW 1 Tahun 2026	Ya	PPPOMN/KU/01	Anggaran yang dikelola tidak memenuhi nilai kinerja anggaran yang ditetapkan

		penurunan tetapi target tidak diturunkan menyesuaikan anggaran yang mengalami penurunan	realisasi anggaran.	Penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung capaian indikator ini agar target penyesuaian yang telah ditetapkan tercapai.	TW 2 Tahun 2026			
--	--	---	---------------------	--	-----------------	--	--	--

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran adalah tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
2. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan)
3. Melaksanakan realisasi belanja setiap bulan sesuai dengan rencana penarikan dana yang tertuang dalam Halaman III DIPA sehingga penyerapan anggaran disetiap triwulannya mencapai target minimal yang ditentukan oleh kementerian keuangan.
4. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
5. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* regular (5 hari kerja setelah bukan berakhir)
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, capaian indikator dan output kegiatan pada setiap bulan.
7. Melakukan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan dan pelaporan data keuangan.

IK 9. INDEKS MANAJEMEN RISIKO PPPOMN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah mekanisme pengawasan menyeluruh yang diterapkan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tujuannya adalah menjamin efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tersebut maka pimpinan instansi pemerintah wajib menilai risiko. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur untuk mengelola risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Tingkat Maturitas adalah kategori yang menunjukkan tingkat penerapan manajemen risiko, terbagi dalam 5 kategori, yang mencerminkan kematangan implementasi manajemen risiko.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu atau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko.

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total / 16

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 47 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPOMN" tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPOMN	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	2,969	3,15	2,938	93,27%	 BAIK

Hasil yang didapatkan pada tahun 2025 masih di atas 90% dengan definisi baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	47,50	47,00	(0,50)
Nilai Maturitas	2,969	2,938	(0,031)
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

Realisasi dan capaian “Indeks Manajemen Risiko PPPOMN” dihitung pada akhir tahun maka dibandingkan dengan hasil realisasi pada tahun 2024 terdapat penurunan nilai dari 2,969 menjadi 2,938. Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra tahun 2029

Tabel 48 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" terhadap target tahun 2029

No	INDIKATOR	TARGET 2029	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,40	2,94	86,41%	 AKAN TERCAPAI

Realisasi kinerja indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko PPPOMN” pada tahun 2025 sebesar 2,94 dengan target akhir renstra sebesar 3,40% sehingga capaian indikator kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 86,41% dengan kriteria “akan tercapai”.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Utama Tanggal 2 Januari 2026 Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 perihal Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan mengacu pada:

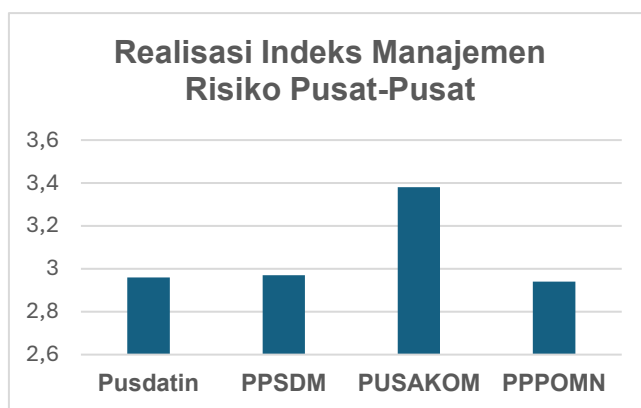
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.11.25.220 dan PI.06.07.7.11.25.220 tanggal 4 November 2025.

Rata-rata nilai maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja BPOM tahun 2025 sebesar 2,875 atau level Risk Aware, dengan rincian rata-rata per kluster sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai Satuan Kerja Eselon I sebesar 3,094 (Risk Defined);
2. Rata-rata nilai Unit Kerja Pusat sebesar 3,205 (Risk Defined);
3. Rata-rata nilai Balai Besar POM sebesar 2,974 (Risk Aware);

Dengan nilai maturitas manajemen risiko PPPOMN sebesar 2,938 terlihat masih di atas nilai rata-rata Badan POM tahun 2025, pada tingkat Risk Aware.



Gambar 9 Realisasi Indeks Manajemen Risiko Pusat-Pusat

Berdasarkan data diatas, Indeks Manajemen Risiko Pusakom memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,38, yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang lebih baik dibandingkan unit kerja lainnya. PPSDM dan Pusdatin masing-masing memperoleh nilai 2,97 dan 2,96, yang mencerminkan penerapan manajemen risiko telah berjalan cukup baik.

PPPOMN memperoleh nilai 2,94, yang relatif sebanding dengan PPSDM dan Pusdatin. Ke depan, PPPOMN akan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan, khususnya dalam aspek monitoring, evaluasi efektivitas pengendalian risiko, serta peningkatan integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, guna mendorong peningkatan Indeks Manajemen Risiko pada periode berikutnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Indikator tersebut pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai target. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal berikut:

- **Kepemimpinan** : Komitmen dan Pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah

- **Proses manajemen risiko** : Proses manajemen risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif
- **Aktivitas penanganan risiko** : Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah
- **Hasil penerapan manajemen risiko**: Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah

Namun, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Badan POM. Faktor penyebab keberhasilan, disebabkan oleh hal-hal berikut yang telah diterapkan dengan baik:

1. PPPOMN telah melakukan pemutakhiran data manajemen risiko secara tertib yaitu minimal setiap semester;
2. PPPOMN telah mengidentifikasi risiko pada setiap sasaran strategis/program/kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan;
3. PPPOMN telah memiliki kriteria dalam penentuan level risiko baik level kemungkinan maupun dampak;
4. Telah terdapat integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja melalui cascading kinerja dan tagging risiko pada setiap Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai;
5. Seluruh pegawai di lingkungan PPPOMN telah mengikuti pelatihan manajemen risiko minimal melalui aplikasi IDEAS.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Untuk saat ini yang sudah dilakukan dalam rangka pengelolaan manajemen risiko di PPPOMN dan meningkatkan hasil maturitasnya adalah sosialisasi dan monitoring evaluasi yang dilakukan secara berkala. **Hal hal yang perlu diperbaiki:**

1. Perlu mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko;
2. Metode identifikasi risiko selain bottom up juga secara top down;
3. Perlu mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru;
4. Perlu melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16 ;
5. Perlu memastikan penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16 .

Tabel 49 Matriks Rekomendasi TW IV Indeks Manajemen Risiko PPPOMN

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	Adanya efisiensi anggaran sehingga peningkatan kompetensi terkait manajemen risiko dengan pelatihan ke luar BPO tidak tercapai	Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang ada	Pelatihan QRMO dan QRMP untuk pegawai PPPOMN yang ditunjuk pada tahun 2025, karena keterbatasan anggaran dialihkan ke Tahun 2026	TW IV 2026	Ya	PPPOMN/FRAUD/03	Implementasi manajemen risiko PPPOMN tahun 2025 tidak berjalan dengan baik

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Melakukan sosialisasi, internalisasi yang lebih intensif atau optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan lain untuk pelatihan manajemen risiko, selain melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala dengan adanya identifikasi risiko yang masuk dalam SAPA APIP setiap semester yaitu sebelum tanggal 20 Januari 2025 dan sebelum tanggal 20 Juli 2025.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja Interim TW III tahun 2025 dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 50 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendas i	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IK 1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan									
	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam	Masih ada beberapa kegiatan yang akan	Menyelesaikan seluruh kegiatan Jejaring nasional dan internasional sesuai rencana	Menyelesaikan seluruh kegiatan Jejaring nasional dan	Selesai	-	-	Ya	PPPOMN/REP/01 PPPOMN/REP/07	1.Kegiatan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu tidak

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sesuatu jejaring secara terpadu	dilaksanakan di TW berikutnya		internasional sesuai rencana					PPPOMN/REP/11 PPPOMN/REP/12 PPPOMN/REP/13 PPPOMN/REP/14 PPPOMN/REP/16 PPPOMN/REP/17 PPPOMN/REP/18 PPPOMN/REP/14 PPPOMN/REP/14 PPPOMN/STRA/13	dapat memenuhi target 2.Kegiatan JLPPi: Pertemuan Teknis, LRPPI Pengujian Mikotoksin, dan Bahan Kontak Pangan olahan tidak dapat terlaksana sesuai target 3.AFTLC tidak dapat terlaksana sesuai target 4.LRPPI Pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan tidak dapat terlaksana sesuai target 5.LRPPI Pengujian GMO dan DNA Spesifik Spesies dalam pangan olahan tidak dapat terlaksana sesuai target 6.Jejaring Obat tidak memenuhi target persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti dengan aktif 7.Kegiatan JLPOBA tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan 8.Jejaring Laboratorium Kosmetik tidak dapat terlaksana sesuai target 9.Jejaring Laboratorium Baku Pembanding tidak terlaksana sesuai target

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										10. Jejaring Laboratorium Kosmetik tingkat ASEAN tidak memenuhi target persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti dengan aktif 11. Jejaring TobLabNet tidak memenuhi target persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti dengan aktif 12. Kegiatan dalam rangka kerjasama dalam lingkup WHO WPRO (Western Pacific Regional Office) tidak terlaksana secara efektif
	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	Masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di TW berikutnya	Pembenahan internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL)	Pembenahan internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL)	Selesai	-	-	Ya	PPPOMN/REP/02	Kegiatan Green Laboratory tidak dapat memenuhi target persentase GD Penguatan Lab Pengujian OM
	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/STRA/06	Kegiatan Digitalisasi Laboratorium tidak dapat memenuhi target persentase GD Penguatan Lab Pengujian OM
	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/REP/32	Pendampingan Laboratorium eksternal tidak terlaksana sesuai perencanaan

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	olahan sesuai standar									
	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/HUK/01 PPPOMN/SDM/05	1. Pengujian Unggul tidak dapat terlaksana pada masa persiapan penerapan regionalisasi laboratorium di Regional Jayapura 2. Perbedaan hasil uji antar laboratorium / antar regional
IK 2	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/STRA/02 PPPOMN/STRA/01 PPPOMN/STRA/03	1.Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) PPPOMN berpotensi tidak mencapai target yang ditetapkan 2.Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM/ Balai POM berpotensi tidak tercapai secara kuantitas sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun secara kualitas kemampuan pengujian kemungkinan tersebut belum seperti yang diharapkan. 3.Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM (Lab tingkat 1) dan Laboratorium Balai POM Kabupaten/kot a (lab tingkat 2) berpotensi tidak tercapai sesuai dengan target yang

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										telah direncanakan
	SKL Tingkat 5	-	-	-	-	-	-			
	SKL Tingkat 4	-	-	-	-	-	-			
	- Balai Regional	-	-	-	-	-	-			
	- BPKOM	-	-	-	-	-	-			
	- BPPB	-	-	-	-	-	-			
	- Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-			
	SKL Tingkat 3	-	-	-	-	-	-			
	SKL Tingkat 2	-	Rekomendasi untuk UPT: - UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya - Agar seluruh UPT selalu mengawal pemenuhan target SKL dengan memaksimalkan capaian pada setiap komponen SKL.	Rekomendasi untuk UPT: - UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya - Agar seluruh UPT selalu mengawal pemenuhan target SKL dengan memaksimalkan capaian pada setiap komponen SKL.	Selesai	-	-			
	SKL Tingkat 1	-	Rekomendasi untuk UPT: - UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya - Agar seluruh UPT selalu mengawal pemenuhan target SKL dengan memaksimalkan capaian pada	Rekomendasi untuk UPT: - UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya - Agar seluruh UPT selalu mengawal pemenuhan target SKL dengan memaksimalkan capaian pada	Selesai	-	-			

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			setiap komponen SKL.	setiap komponen SKL.						
IK 3	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/OP/01 PPPOMN/OP/02 PPPOMN/OP/03 PPPOMN/OP/04 PPPOMN/OP/05	1. Pengembangan MA Kobonappza tidak sesuai rencana yang ditetapkan Pengembangan MA KPOA tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan 2. Pengembangan MA Kosmetik tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan 3. Pengembangan MA OTSK tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan 4. Pengembangan MA MBM tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan
IK 4	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/OP/07 PPPOMN/REP/30 PPPOMN/REP/31	1. Pengembangan BP tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan secara kuantitas 2. Pengembangan BP tidak sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan secara kualitas 3. Pengelolaan BP sebagai aset barang persediaan tidak maksimal

Kode	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
IK 5	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/REP/06	Indeks pelayanan publik PPPOMN tidak meningkat sesuai target yang ditetapkan
IK 6	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	-	-	-	-	-	-	Ya		
IK 7	Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/STRA/11 PPPOMN/STRA/12	1.Perencanaan yang dilakukan tidak memenuhi target nilai AKIP PPPOMN yang ditetapkan 2.Monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak memenuhi target nilai AKIP PPPOMN yang ditetapkan
IK 8	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	-	-	-	-	-	-	Ya	PPPOMN/KU/01	Anggaran yang dikelola tidak memenuhi nilai kinerja anggaran yang ditetapkan
IK 9	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	1.Pembuatan ManRisk Semester I Tahun 2025 telah masuk SAPA APIP 2.Penyelesaian kertas kerja risiko oleh masing masing Ka Tim dan PJ Kegiatan 3.Sosialisasi ManRisk 24 Februari 2025, ""Monev Manrisk 9 April 2025 4.Monev Manrisk 25 Juni 2025	1. reviu Manrisk semester II tanggal 3 Juli 2025. 2. Memasukkan Manrisk Semester II Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 di SAPA APIP 3. Monev Manrisk TW III tanggal 24 Sep 2025	1. reviu Manrisk semester II tanggal 3 Juli 2025. 2. Memasukkan Manrisk Semester II Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 di SAPA APIP 3. Monev Manrisk TW III tanggal 24 Sep 2025	Selesai	-	-	Ya	PPPOMN/RAUD/03	Implementasi manajemen risiko PPPOMN tahun 2025 tidak berjalan dengan baik

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pemanfaatan data kinerja dalam

organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan.

Laporan kinerja PPPOMN sangat bermanfaat bagi PPPOMN untuk meningkatkan kinerja, melalui antara lain:

- Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja,
- Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja,
- Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja,
- Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Tabel 51 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisis Realisasi Indikator 2025
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	Capaian indikator kinerja ini adalah 119,1% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Mengingat indikator ini sifatnya adalah jangka panjang, maka capaian indikator dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya dan juga dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian kebutuhan anggaran ke depan sesuai roadmap Grand Design. Informasi kinerja dapat memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kontribusi terhadap target organisasi, penyesuaian anggaran secara lebih tepat sasaran, guna memastikan bahwa alokasi sumber daya mendukung untuk mencapai output yang diharapkan. Selain itu, data kinerja menjadi dasar dalam proses evaluasi pencapaian keberhasilan, termasuk tindak lanjut terhadap rekomendasi dan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk pengendalian internal dan perbaikan berkelanjutan.
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium	Capaian indikator kinerja ini adalah 101,95% dengan kategori sangat baik. Pemanfaatan data kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Informasi ini sangat berguna untuk penyesuaian strategi, program/kegiatan laboratorium pengujian agar dapat memenuhi standar sesuai SKL yang telah ditetapkan.
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Capaian indikator ini adalah 99,83% dengan kategori baik, namun belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. IKU ini merupakan <i>core business process</i> PPPOMN sehingga harus diperhatikan capaiannya. Laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk evaluasi lebih lanjut terkait kebutuhan pengembangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisis Realisasi Indikator 2025
			metode analisis, penyesuaian strategi dan target sesuai dengan anggaran yang tersedia. Penyesuaian program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja dan memonitoring faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan baku pembanding, media, reagen, suku cadang, alat sehingga tidak menghambat proses pengembangan MA.
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Capaian indikator ini adalah sebesar 98,92% dengan kategori baik, namun tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Informasi kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terutama terkait perencanaan target kebutuhan pengembangan baku pembanding untuk tahun berikutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia penyesuaian strategi, program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja, dan adanya penambahan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan.
3	Layanan Publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang Prima	Indeks pelayanan publik PPPOMN	Capaian indikator ini adalah 104,00% dengan kategori sangat baik. Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk perencanaan dan penyesuaian strategi/kegiatan dalam memberikan layanan prima, antara lain dengan inovasi layanan, peningkatan kompetensi SDM, dan fasilitasi sarana prasarana pelayanan publik.
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	Capaian indikator ini adalah 100,1% dengan kategori sangat baik. Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap triwulan sangat bermanfaat untuk memantau capaian target indikator "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN", dimana dapat mengantisipasi dan melakukan revisi terkait anggaran dan target tahunan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan penyesuaian strategi dalam penyesuaian aktivitas/kegiatan dan upaya untuk mencapai target kinerja dengan kategori baik, serta perbaikan kinerja nilai pembangunan zona integritas PPPOMN di masa mendatang.
		Nilai AKIP PPPOMN	Capaian indikator ini adalah 94,67% dengan kategori baik. Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan tiap bulan dan triwulan sangat bermanfaat untuk pemantauan capaian kinerja untuk indikator "Nilai AKIP PPPOMN" dan penyesuaian strategi dalam penyesuaian aktivitas/kegiatan, penggunaan anggaran, dan upaya untuk mencapai target kinerja dengan kategori baik, serta penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Selain itu, laporan kinerja ini sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi untuk kinerja yang lebih baik.
		Nilai kinerja anggaran PPPOMN	Capaian indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Meskipun capaian sudah tinggi, namun harus terus dilakukan peningkatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisis Realisasi Indikator 2025
			kinerja melalui berbagai aktivitas/inovasi. Laporan kinerja tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap perbaikan program/kegiatan PPPOMN untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di tahun berikutnya.
		Indeks Manajemen Risiko	Capaian indikator ini adalah 93,27 dengan kategori baik. Pemanfaatan informasi kinerja "Indeks Manajemen Risiko" pada laporan kinerja dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas maturitas manajemen risiko dalam mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan terkait manajemen risiko Level 3 Risiko Ditetapkan (Risk Defined) Kerangka penilaian / tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai. Penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan evaluasi dan analisis efisiensinya.

Analisis realisasi anggaran dilaksanakan per sasaran dan per program/kegiatan. Realisasi anggaran PPPOMN sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp39.886.804.742,00 atau 37,72% dari pagu yang dikelola PPPOMN sebesar Rp105.730.656.000,00, nilai pagu ini merupakan nilai pagu sebelum adanya blokir anggaran terkait dengan efesiensi pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran yang dikelola PPPOMN setelah adanya blokir anggaran adalah sebesar Rp39.888.843.000,00, sehingga jika dibandingkan dengan anggaran setelah blokir, maka realisasi anggaran PPPOMN per Triwulan IV Tahun 2025 adalah 99,99%.

Berikut realisasi anggaran per sasaran kegiatan yang ada pada PPPOMN :

Tabel 52 Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	IK No	Indikator	Anggaran	Realisasi TW IV	% Realisasi
1	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3,112,917,000	497,327,507	15.98%
2	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	IK 2	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	75,896,050,000	17,906,397,042	23.59%
		IK 3	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	4,142,760,000	3,125,168,919	75.44%
		IK 4	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	2,183,797,000	1,025,353,481	46.95%
3	03 - Layanan Publik PPOMN yang prima	IK 5	Indeks Pelayanan Publik PPOMN	596,430,000	339,664,977	56.95%
4	07 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi Yang optimal	IK 6	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	452,407,000	44,884,823	9.92%
		IK 7	Nilai AKIP PPOMN	1,165,000	1,165,000	100.00%
		IK 8	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	19,344,590,000	16,946,303,493	87.60%
		IK 9	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	540,000	539,500	99.91%
Total				105,730,656,000	39,886,804,742	37.72%

Untuk pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien

atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

Berikut rekapitulasi analisis terhadap efisiensi anggaran dalam pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja PPPOMN:

Tabel 53 Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja PPPOMN

No	Sasaran Kegiatan	IK No	Indikator	Output TW III			Input			IE	SE	TE	Kategori
				Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian Indikator (Output)	Target	Realisasi	% Capaian Indikator (Input)				
1	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42.3	50.41	119.17	497,358,000	497,327,507	99.99	1.19	1	0.19	Efisien
2	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	IK 2	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	68.5	69.83	101.95	17,906,596,000	17,906,397,042	100.00	1.02	1	0.02	Efisien

		IK 3	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.91	80.77	99.83	3,125,228,000	3,125,168,919	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
		IK 4	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.04	79.18	98.92	1,025,375,000	1,025,353,481	100.00	0.99	1	-0.01	Tidak Efisien
3	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	IK 5	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.7	4.89	104.04	339,670,000	339,664,977	100.00	1.04	1	0.04	Efisien
4	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK 6	Nilai Pembangunan ZI PPMN	91.59	91.66	100.08	44,887,000	44,884,823	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
		IK 7	Nilai AKIP PPPOMN	85	80.47	94.67	1,165,000	1,165,000	100.00	0.95	1	-0.05	Tidak Efisien
		IK 8	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	5	100.00	16,948,024,000	16,946,303,493	99.99	1.00	1	0.00	Efisien
		IK 9	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3.15	2.938	93.27	540,000	539,500	99.91	0.93	1	-0.07	Tidak Efisien

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dari 9 IK terdapat 3 IK dengan kategori Tidak Efisien sebagai berikut :

1. IK 4 Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. IK 7 Nilai AKIP PPPOMN.
3. IK 9 Indeks Manajemen Risiko PPPOMN.

Ketidakefisienan ketiga indikator tersebut disebabkan beberapa hal berikut:

1. Ketidakseimbangan antara target kinerja dan sumber daya

Target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun sarana prasarana, sehingga pelaksanaan kegiatan memerlukan upaya tambahan yang berdampak pada menurunnya efisiensi kinerja.

2. Perubahan kebijakan dan dinamika regulasi

Adanya perubahan kebijakan, penyesuaian prioritas nasional, atau regulasi teknis di tengah tahun anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada keterlambatan dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal

3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran

Penerapan kebijakan efisiensi atau *refocusing* anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 yang dilakukan setelah kegiatan berjalan mengakibatkan perubahan skala, metode, atau output kegiatan, sehingga capaian kinerja tidak sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan. Selain itu, target yang telah ditetapkan pada awal tahun misalnya untuk indikator “persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” tidak bisa dilakukan perubahan target sesuai dengan anggaran efisiensi. Akibatnya, realisasi output kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia karena untuk kebutuhan pengembangan baku pembanding membutuhkan anggaran untuk pengadaan bahan baku, baku primer, reagen, dll.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja PPPOMN Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi PPPOMN tahun 2025 adalah **100,31** dengan predikat kinerja “**Istimewa**”.
2. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan pada 2025 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** (realisasi < 110%), yaitu Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** (realisasi $100\% < x \leq 110\%$), yaitu (1) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium, (2) **Indeks Pelayanan Publik PPPOMN**, (3) Nilai Pembangunan ZI PPPOMN dan 5 (lima) Indikator Kinerja dengan kriteria **Baik** (realisasi $90\% < x \leq 100\%$), yaitu (1) Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (2) Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (3) Nilai AKIP PPPOMN, (4) Nilai Kinerja Anggaran, dan (5) Indeks Manajemen Risiko PPPOMN. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2029 maka terdapat 1 (satu) indikator **perlu upaya keras** dan 8 (delapan) indikator **akan tercapai**.
3. Penyerapan anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 39.886.804.742 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan persentase 99,99% terhadap pagu blokir mandiri dan 37,72% terhadap pagu awal sebelum blokir mandiri.

4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi umum untuk peningkatan kinerja PPPOMN pada periode Renstra 2025-2029, antara lain:

1. Melaksanakan analisis dan revaluasi terhadap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan PPPOMN secara mendalam berdasarkan tren data capaian indikator 2020-2024, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi baseline pada perencanaan

strategis PPPOMN mendatang (Renstra 2025-2029). Reviu juga dilakukan terhadap definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja kegiatan PPPOMN.

2. Melakukan penyesuaian target terhadap indikator yang terdampak efisiensi anggaran
3. Melakukan upaya perbaikan tahun kedepan untuk indikator yang belum memenuhi target di tahun 2025
4. Mengoptimalkan peran PPPOMN dengan berpartisipasi aktif pada jejaring laboratorium Obat dan Makanan, untuk memberdayakan laboratorium eksternal melalui pendampingan laboratorium eksternal dalam turut serta melakukan pengawasan Obat dan Makanan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIMIN JIWO WINANTI
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 October 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

MIMIN JIWO WINANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42.3 %
2.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	05 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	68.5 Nilai
		09 - Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.91 Persentase
		11 - Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.04 Persentase
3.	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.7 Indeks
4.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91.59 Nilai
		02 - Nilai AKIP PPPOMN	85 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5 Klasifikasi
		04 - Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3.15 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 105,474,877,000 (Seratus Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	510,610,000
2.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	86,128,510,000

NO. KEGIATAN

ANGGARAN

3. WA 6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

18,835,757,000

Jakarta, 01 October 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

MIMIN JIWO WINANTI

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 2. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN														
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1.	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan									10.5	10.5	10.5	42.3
														3,112,917,000
NO.		RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
1.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		J - Pendampingan Pengujian dalam rangka Implementasi Regionalisasi Laboratorium		40,248,000		40,248,000					
2.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	051 - Pemenuhan grand design penguatan Laboratorium Hijau (Green Laboratory)		B - Assesment Green Laboratory		126,316,000		126,316,000					
3.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		I - Pembardayaan Laboratorium Eksternal untuk Sediaan Farmasi Umum		94,040,000		94,040,000					
4.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		H - Pelatihan dalam dan Luar Negeri		129,375,000		129,375,000					
5.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		G - Partisipasi Aktif dalam Pertemuan Kegiatan Jejaring Laboratorium Kosmetik (ACTLC)		73,166,000		73,166,000					
6.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		F - Pelatihan LRPPI Kimia Pangan untuk Cemaran Logam, Mineral, dan Mikotoksin		105,750,000		105,750,000					
7.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		E - Penguatan Laboratorium BPOM dalam Jejaring ASEAN Pangan (AFRL Food Additive)/workshop AFRL		92,250,000		92,250,000					
8.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		D - Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee /APTLC)		90,856,000		90,856,000					
9.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		C - Rapat Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium		23,800,000		23,800,000					
10.	DR.4133.PDD.001	- Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM		B - Pertemuan Nasional Monitoring dan Evaluasi Sistem Regionalisasi- Laboratorium BPOM		534,603,000		534,603,000					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
11.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			A - Pengujian Sampel PQ WHO KOBONAPPZA			300,000,000			300,000,000			
12.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			J - Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Pangan (ASEAN Food Testing Laboratory Committee /AFTLC)			78,550,000			78,550,000			
13.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			I - Jejaring Laboratorium Obat Tradisional (JLOT)			70,800,000			70,800,000			
14.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			H - Monitoring dan Evaluasi Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia			220,480,000			220,480,000			
15.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			G - Pertemuan Jejaring Laboratorium Baku Pembanding			128,330,000			128,330,000			
16.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			F - Jejaring penguatan kapasitas laboratorium SEARN			8,625,000			8,625,000			
17.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			E - Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Jejaring dalam rangka Laboratorium Terintegrasi			19,230,000			19,230,000			
18.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			D - Penguatan Laboratorium LRPI untuk Bahan Kontak (Kemasan) Pangan			53,075,000			53,075,000			
19.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			C - Pelatihan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan (JLPPJ) GMO/DNA Spesifik Spesies			101,388,000			101,388,000			
20.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			B - Pertemuan LRPI (Jejaring Lab) MBM			34,000,000			34,000,000			
21.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			A - Pertemuan Teknis Jejaring Pengujian Pangan Indonesia			44,325,000			44,325,000			
22.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		052 - Pemenuhan grand design penguatan Digitalisasi Laboratorium (Digital Laboratory)			B - Rapat Persiapan Penyusunan Grand Design Laboratorium BPOM (Digitalisasi Laboratorium)			38,150,000			38,150,000			
23.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		052 - Pemenuhan grand design penguatan Digitalisasi Laboratorium (Digital Laboratory)			A - Sosialisasi Grand Desain Laboratorium BADAN POM (Digital Laboratory)			330,429,000			330,429,000			
24.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		051 - Pemenuhan grand design penguatan Laboratorium Hijau (Green Laboratory)			A - Sosialisasi Grand Desain Laboratorium BADAN POM (Green Laboratory)			375,131,000			375,131,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

2.	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	05 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sedian farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			61.5	61.5	61.5	62.8	62.8	62.8	67.1	67.1	67.1	68.5	76,356,031,000
----	---	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	G - Pemeliharaan Peralatan, Sistem dan Sarana Prasarana Laboratorium	631,648,000	631,648,000
2.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	A - Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri	221,700,000	221,700,000
3.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	A - Workshop Dalam Negeri	150,156,000	150,156,000
4.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	B - Asesmen dan Koordinasi ke BB/Balai POM	165,648,000	165,648,000
5.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	C - Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium MBM	20,185,000	20,185,000
6.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	D - Penilaian Kemampuan Pengujian LOKA POM	79,896,000	79,896,000
7.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	E - Asesmen Kemampuan Pengujian Balai POM Baru (Balai POM di Kabupaten/Kota)	47,096,000	47,096,000
8.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	A - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Bimtek KONAPPZA	71,070,000	71,070,000
9.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	B - Peningkatan Kapasitas Pengujian di Loka POM (Rapid Test Obat Nappza) - Poksi KOBONAPPZA	63,230,000	63,230,000
10.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	C - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk Laboratorium Badan POM	49,012,000	49,012,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI		
		11.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	D - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kosmetik untuk Laboratorium Badan POM				40,592,000				40,592,000		
		12.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	E - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Kimia Pangan dan Air				90,970,000				90,970,000		
		13.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	F - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Mikrobiologi				86,300,000				86,300,000		
		14.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	A - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Kimia Kosmetik				63,000,000				63,000,000		
		15.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	B - Penyelenggaraan Uji Profisiensi kimia pangan dan air				46,000,000				46,000,000		
		16.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	C - Penyelenggaraan Uji Profisiensi KOBONAPPZA				58,500,000				58,500,000		
		17.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	E - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Mikrobiologi dan Biologi Molekuler				78,000,000				78,000,000		
		18.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	D - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Kimia OT OKSK				66,935,000				66,935,000		
		19.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	H - Bimtek Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/ Balai POM/ Loka POM				19,600,000				19,600,000		
		20.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium				74,029,493,000				74,029,493,000		
		21.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan penunjang sarana dan prasarana PPPOMN				272,000,000				272,000,000		
		22.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium	I - Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium				5,000,000				5,000,000		
		09 - Persentase Metode Analisis yang dikembangkan		76.82	76.82	76.82	77.99	77.99	77.99	78.7	78.7	78.7	80.91	3,677,000,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan													
NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
1.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	053 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian	C - Koordinasi/ Diskusi/ Pembahasan Pengembangan Pengujian				62,125,000		62,125,000						
2.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	G - Pemeliharaan Alat Laboratorium				782,293,000		782,293,000						
3.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	F - Workshop Internal Laboratorium BSL 2 dan BSL 3				19,285,000		19,285,000						
4.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	E - Workshop Internal Laboratorium Kimia Kosmetik				42,542,000		42,542,000						
5.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	D - Workshop Internal Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler				53,840,000		53,840,000						
6.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	C - Workshop Internal Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air				37,988,000		37,988,000						
7.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	B - Workshop Internal Laboratorium Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan				35,542,000		35,542,000						
8.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	F - Pengembangan Metode Analisis Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air				429,900,000		429,900,000						
9.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	E - Pengembangan Metode Analisis Laboratorium Pengujian BSL 3				229,650,000		229,650,000						
10.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	D - Pengembangan Metode Analisis Laboratorium Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler				781,400,000		781,400,000						
11.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	B - Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Kosmetik				306,647,000		306,647,000						
12.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	A - Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan				251,350,000		251,350,000						
13.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian	A - Workshop Internal Laboratorium Kimia Obat dan Napza				61,220,000		61,220,000						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		14.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	051 - Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	C - Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	368,980,000	368,980,000								
		15.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	053 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian	B - FGD Percepatan Pemanfaatan Fitofarmaka	66,800,000	66,800,000								
		16.	DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	053 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian	A - Penerapan Sistem Mutu (Surveilans/Audit Internal)	147,438,000	147,438,000								
	11 - Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		75.51	75.51	75.51	76.48	76.48	77.22	77.22	77.22	80.04	1,933,297,000			
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI								
		1.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembanding	C - Peningkatan Jumlah dan Jenis Baku Pembanding Mikroba	133,000,000	133,000,000								
		2.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembanding	D - Forum BPFI, Forum Komunikasi Publik, Campaign RB, Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Suap	18,131,000	18,131,000								
		3.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pombanding	D - Koordinasi hasil uji baku pembanding di Yogyakarta	18,740,000	18,740,000								
		4.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembanding	C - Pelaksanaan dan Pemeliharaan Kapasitas Pengembangan BP Kimia dan BP Mikroba (Monitoring dan evaluasi BP)	23,035,000	23,035,000								
		5.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembanding	B - Pemeliharaan Alat Laboratorium	108,744,000	108,744,000								
		6.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembanding	A - Pelaksanaan dan Pemeliharaan Akreditasi Produsen Bahan Acuan	13,050,000	13,050,000								
		7.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembanding	C - Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding II dan III	57,400,000	57,400,000								
		8.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembanding	B - Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Baku Pembanding	81,050,000	81,050,000								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		9.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembanding			A - Pengadaan Pengembangan Baku Pembanding Nasional Tahun 2025			1,088,156,000			1,088,156,000	
		10.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembanding			E - Pelaksanaan Pengembangan Baku Pembanding Mikroba			54,841,000			54,841,000	
		11.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembanding			B - Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding I dengan Narasumber			101,000,000			101,000,000	
		12.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembanding			A - Pembahasan Percepatan Pemenuhan Baku Pembanding dengan Industri, Perguruan Tinggi, dan K/L lain			225,550,000			225,550,000	
		13.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembanding			D - Akreditasi SMAP ISO 370001 : 2016			11,100,000			11,100,000	
3.	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik PPPOMN													4,7	596,430,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			A - Pelayanan Publik PPPOMN			28,312,000			28,312,000		
		2.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			B - Publikasi Pelayanan Publik PPPOMN			4,096,000			4,096,000		
		3.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			E - Pengelolaan Pengujian Laboratorium			430,560,000			430,560,000		
		4.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			D - Kerja Sama Antar Satker di BPOM/Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait			116,200,000			116,200,000		
		5.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			C - Inovasi Pelayanan Publik PPPOMN			17,262,000			17,262,000		
4.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI PPPOMN													91.59	435,980,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BK9.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB			435,980,000			435,980,000		
		02 - Nilai AKIP PPPOMN													85	14,300,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BK8.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Rapat Penyusunan Renstra 2025-2029			14,300,000			14,300,000		
		03 - Nilai Kinerja													5	19,346,406,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			Anggaran PPOMN												
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		D - Rapat Persiapan, Money dan Koordinasi Kegiatan		58,314,000		58,314,000							
2.	DR.4133.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Sarana Pengujian		452,335,000		452,335,000							
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Penatausahaan, monitoring dan penyusunan laporan BMN		8,750,000		8,750,000							
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPOMN		7,748,536,000		7,748,536,000							
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2		9,920,000		9,920,000							
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4		73,800,000		73,800,000							
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Perbaikan Saranan Prasarana		462,342,000		462,342,000							
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - Perawatan Sarana Genset, Air, Listrik, Telepon dan Pembelian Solar		184,121,000		184,121,000							
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Perawatan Peralatan Kantor		201,438,000		201,438,000							
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - Perawatan Gedung Kantor		491,889,000		491,889,000							
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - Langgaran Daye dan Jasa		4,601,988,000		4,601,988,000							
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - Administrasi Kegiatan Perkanteran		5,052,973,000		5,052,973,000							
04 - Indeks Manajemen Risiko PPOMN														3.15	2,016,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	DR.3165.BKB.001 - Laperan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - Pelaksanaan Manajemen Risiko PPPOMN Tahun 2025		2,016,000		2,016,000							
												Total	105,474,877,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 01 October 2025

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional


MIMINJIWO WINANTI